

**PENGARUH INVESTASI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI
JAWA BARAT 2004-2012**

MELISA DWI PUSPA

8105108117



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI & ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014**

**THE INFLUENCES OF INVESTMENT AND GOVERNMENT
EXPENDITURE OF ECONOMICS GROWTH DISTRICT/CITY IN
WEST JAVA IN THE YEAR OF 2004-2012**

MELISA DWI PUSPA

8105108117



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment at The
Faculty of Economic, State University of Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF EDUCATION ECONOMIC
CONCENTRATION IN EDUCATION ECONOMIC COOPERATIVE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMIC
STATE UNIVERSITY OF JAKARTA
2014**

ABSTRAK

MELISA DWI PUSPA. “Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2004-2012”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. Dosen Pembimbing: Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si dan Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat baik secara simultan maupun secara parsial. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis data *time series* periode 2004-2012 dan *cross section* sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, penyeleksian ini dipilih berdasarkan data setiap tahunnya terdapat di daerah tersebut. Penelitian ini menghasilkan 108 observasi, diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Metode penelitian menggunakan metode *ekspose facto*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda Dengan menggunakan model analisis regresi berganda menggunakan software *Eviews 6,0*, output menunjukkan bahwa investasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Barat dan pengeluaran pemerintah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Jawa Barat. Dari hasil Uji F dengan memperhatikan nilai signifikansinya $= 0,000000 < 0,05$ maka dapat dikatakan secara simultan investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0.853721 memiliki pengertian bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh perubahan investasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 85,37% sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak ada dalam model penelitian ini. Kesimpulannya terdapat pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0493 dan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0000.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah

ABSTRACT

MELISA DWI PUSPA. “The Influences of Investment and Government Expenditure of Economic Growth District/City in West Java in the year of 2004-2012.” Thesis. The Education of Cooperation Economic. Economic and Administration Major. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2014. Lecturer Advisor Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si dan Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd

This research is aimed to analyze the influence of investment and government expenditure of economic growth district/city in west Java. The data used in this research are the secondary data which is time series type of data in the year of 2004-2012 and cross section as many as 12 Kabupaten/city in Province East Java, which produces 108 observations, source from BPS and BKPM. The method of this research is expose facto. The technique of data analysis in this research is the multiple regression analysis. Based on multiple regressions using Eviews 6,0 software, the output has indicated the investment (X1) is positive and significantly affected to the economic growth (Y) in West Java. While, the government expenditure (X2) is positively and significantly affected to the economic growth (Y) in West Java. Based on the test with respect to F significant value = 0,000000 < 0,05, it is can be concluded that the investment and government expenditure as togetherness is significantly affected on $\alpha = 5\%$ against to the economic growth in West Java. Determination coefficient value that obtained is 0,853721, it means that the changes of the economic growth be explained by the investment and government expenditure as amount 85,37 %. While, the rest could be explained by others factor that can not be mentioned in this research model. Conclusion there are significant investment to economic growth by 0.0493 and effect government spending to economic growth by 0.0000.




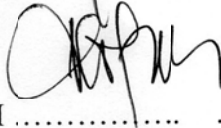

Keywords : Economic Growth, Investment and Government Expenditure

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Karuniana Dianta AS, S.IP. M.E.</u> NIP. 19800924 200812 1 002	Ketua		21/7/14
2. <u>Dr. Siti Nurjanah, SE M.Si</u> NIP. 19720114 199802 2 001	Sekretaris		23/7/14
3. <u>Dr. Saparuddin, SE, M.Si.</u> NIP. 19770115 200501 1 001	Penguji Ahli		25/7/14
4. <u>Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si.</u> NIP. 19700207 200812 1 001	Pembimbing I		24/7/14
5. <u>Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd</u> NIP. 19530320 198203 2 001	Pembimbing II		23/7/14

Tanggal Lulus: 16 Juli 2014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Negeri Jakarta
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, Juli 2014

Yang membuat pernyataan



LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya percaya bahwa ketika TUHAN menempatkan saya di awal perjalanan ini, Dia jugalah yang akan menuntun saya hingga ke akhirnya. Dia tidak akan membawa saya sejauh ini hanya untuk kegagalan.

SPECIAL DEDICATION

THIS ESSAY IS DEDICATION TO LOVELY MOTHER AND FATHER (I ALWAYS PRAY FOR YOU HAPPINESS, FOR NOW AND FOREVER) AND MY SISTERS MEGA, DINA, DEVI AND NABILA. I FINALLY CONSIDER MY SELF ONE OF THE LUCKIEST PEOPLE ALL AROUND THE WORLD FOR HAVING A WONDERFUL FAMILY LIKE YOU. YOU HAVE ALWAYS BEEN THERE FOR ME WITH YOUR LOVE, GUIDANCE, SUPPORT AND SOMETIMES SACRIFICES. I LOVE YOU ALL MORE THAN YOU KNOW, MAY ALLAH BLESS US. AMIIN...

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari

sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S Al-Insyirah : 5-8)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, kekuatan dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini yang berjudul *“Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004 - 2012”*.

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Haryo Kuncoro, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Endang Sri Rahayu, M.Pd, selaku dosen pembimbing II yang telah sangat sabar memberikan saran dan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak Drs. Nurdin Hidayat, M.M, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi
3. Ibu Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Bapak Karuniana Dianta A.S, S.IP, ME, selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi
4. Teristimewa, Bapak Nasim dan Ibu Upiah tercinta yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi dalam hidup, yang senantiasa melantunkan iringan doa

dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan, perhatian, cinta, kasih sayang, dan doa yang tulus selama ini. _

5. Kakakku Mega dan Adik-adikku Dina, Devi dan Nabila terimakasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
6. Partner terbaik dalam yang selalu memberikan motivasi Yohana Octaviani S, Irma Rizki, dan Evina Yulita. Serta sahabat-sahabat seperjuangan Citra, Dewi Mentari, Resti, Veranika, Annisa Virdania, Arum, Iftah, Riva Elisa, Annisa Khusnul.
7. Teman-teman seperjuangan kelas Pendidikan Ekonomi Koperasi Non Reguler 2010, terimakasih untuk keceriaan yang telah mewarnai hari-hari penulis selama empat tahun.
8. Anzansepty Dion Utama yang memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2014

Melisa Dwi Puspa

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
TITLE	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xivi
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Pembatasan Masalah.....	15
D. Perumusan Masalah	16
E. Kegunaan Penelitian	16
BAB II. KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual	18
1. Pertumbuhan ekonomi	18
2. Investasi	29
3. Pengeluaran pemerintah.....	37
B. Hasil Penelitian yang Relevan	44
C. Kerangka Teoretik.....	46
D. Perumusan Hipotesis.....	49
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	50
B. Objek Penelitian	50

C. Metode Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	52
1. Pertumbuhan Ekonomi	
a. Definisi Konseptual.....	52
b. Definisi Operasional	52
2. Investasi	
a. Definisi Konseptual.....	53
b. Definisi Operasional	53
3. Pengeluaran Pemerintah	
a. Definisi Konseptual.....	53
b. Definisi Operasional	54
F. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel	54
G. Teknik Analisis Data	55
1. Metode Analisis.....	55
a. Analisis Data Panel.....	55
b. Estimasi Model.....	57
2. Uji Metode Estimasi Data Panel	60
3. Pengujian asumsi klasik	
a. Uji Normalitas.....	61
b. Uji Heterokedastisitas.....	63
4. Pengujian Kriteria Statistik	
a. Pengujian signifikansi simultan (Uji F).....	64
b. Uji t (partial test).....	65
c. Uji Koefisien determinasi.....	66

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	68
1. Pertumbuhan Ekonomi	68
2. Investasi	73
3. Pengeluaran Pemerintah.....	80
B. Analisis Data	88
1. Persamaan Regresi	90
2. Uji Hipotesis	92
a. Uji t	92
b. Uji F	94
3. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R)	95
4. Uji Asumsi Klasik.....	96
a. Uji Normalitas	96
b. Uji Heteroskedastisitas	98
C. Pembahasan	99
D. Keterbatasan Penelitian	104

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan	105
B. Implikasi	106
C. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112
RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data realisasi investasi, pengeluaran pemerintah dan PDRB 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat	112
Lampiran 2	Data realisasi investasi, pengeluaran pemerintah dan PDRB 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat (LN).....	115
Lampiran 3	Uji Chow	118
Lampiran 4	Uji Hausman	119
Lampiran 5	Persamaan Regresi	120
Lampiran 6	Uji Normalitas	121
Lampiran 7	Uji Heteroskedastisitas	122
Lampiran 8	Tabel Distribusi t	123
Lampiran 9	Tabel Distribusi F	124

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Laju Pertumbuhan ekonomi Enam Provinsi di Pulau Jawa 2007-2012 (dalam persen)..... 4
Tabel 1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2007-2012 (persen)..... 6
Tabel 1.3	Perkembangan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat..... 12
Tabel 4.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota 2004-2012 (Miliar Rupiah)..... 69
Tabel 4.2	Laju Pertumbuhan ekonomi 2004-2012 (dalam jutaan)..... 69
Tabel 4.3	PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2004-2012..... 72
Tabel 4.4	Realisasi investasi 12 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat tahun 2004-2012 75
Tabel 4.5	Realisasi PMA dan PMDN 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004 - 2012..... 76
Tabel 4.6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004-2012 82
Tabel 4.7	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Belanja rutin dan pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat 86
Tabel 4.8	Uji Chow 89
Tabel 4.9	Uji Hausman..... 90
Tabel 4.10	Persamaan Regresi..... 91
Tabel 4.11	Uji t..... 93
Tabel 4.12	Uji F..... 95
Tabel 4.12	Uji Koefisien Determinasi..... 96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2005-2012 2
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen)..... 5
Gambar 4.1	Uji Normalitas..... 97
Gambar 4.2	Uji Heteroskedastisitas..... 98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi di setiap negara dunia agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dalam Michael P. Todaro mengatakan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengetasan kemiskinan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.¹

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan disuatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu siklus ke berikutnya kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, disebabkan oleh faktor yang mengalami dari segi jumlah dan kualitasnya.

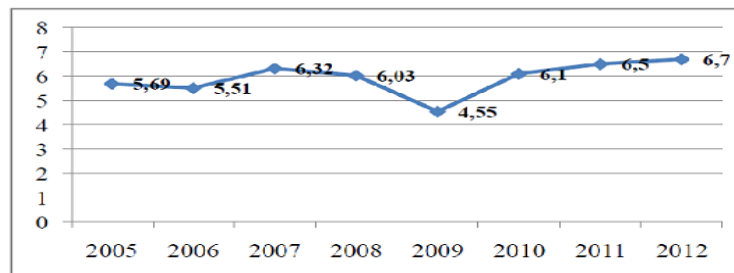
¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. (Jakarta: Erlangga,2000)

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam industri yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati masyarakat paling bawah baik dengan sendirinya maupun campur tangan pemerintah.

Faktanya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bersifat inklusif atau berkelanjutan, dikarenakan masih ada sebagian kelompok yang belum menikmati pertumbuhan ini. Selama ini, pertumbuhan ekonomi bersumber pada konsumsi dalam negeri maupun modal asing yang masuk ke sektor-sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan.

“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semu hanya melihat dari indikator ekonomi makro. Seharusnya setiap pertumbuhan ekonomi di sebuah negara dapat berimplikasi positif terhadap berkurangnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.” anggota DPR, Hendrawan Supratikno.²

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 - 2012 (dalam persen)



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2012

² Gatti,, *Pertumbuhan Ekonomi Belum Bersifat Inklusif*,
<http://beritamometer.com/pertumbuhan-ekonomi-belum-bersifat-inklusif/> (diakses 20April 2014)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2005 hingga 2012 cenderung mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2009 perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat terjadinya krisis global. Pada krisis global perekonomian Indonesia mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kinerja neraca pembayaran yang menurun, tekanan kepada nilai tukar rupiah, dorongan pada laju inflasi (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010). Dalam hal ini Bank Indonesia mengambil beberapa kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Perekonomian Indonesia tahun 2009 secara umum mampu melewati tantangan krisis global meskipun pertumbuhannya lebih rendah dari tahun 2008. Mulai tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 6,10% hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai bangkit dari krisis global tahun sebelumnya.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Provinsi Jawa Barat memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

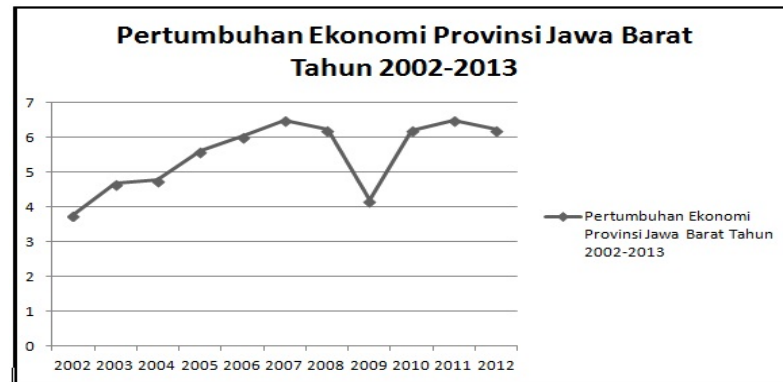
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang merasakan dampak dari krisis tahun 2008. Akibat dari krisis ini industri-industri berskala besar mengalami penurunan produksi akibatnya pengangguran semakin bertambah bahkan dapat mencapai 2,5juta jiwa. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tengah mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan ekspor dari pelemahan daya beli pasar luar negeri.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2007 - 2012 (dalam persen)

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	DKI Jakarta	6,44	6,23	5,02	6,5	6,71	6,32
2.	Jawa Tengah	5,59	5,61	5,14	5,84	6,01	6,34
3.	Jawa Barat	6,48	6,21	4,19	6,2	6,48	6,21
4.	DI Yogyakarta	4,31	5,03	4,43	4,88	5,16	5,32
5.	Jawa Timur	6,11	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27
6.	Banten	6,04	5,77	4,71	6,08	6,43	6,15
7.	Nasional	5,67	5,74	4,77	6,13	6,32	6,26

Berdasarkan tabel 1.1 Jawa Barat dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur pada tahun 2011 termasuk dalam daerah yang lambat. Pada tahun 2009 mengalami penurunan dan cenderung di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, ini disebabkan adanya dampak terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,21% hal itu terjadi seiring dengan pelemahan rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Saat ini perekonomian nasional dibayang-bayangi dengan

krisis global, ini dapat berdampak negatif pada perkembangan ekonomi. Indikasinya terlihat pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan III dan IV tahun ini berpotensi tumbuh lebih lambat daripada tahun lalu.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah)

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut
Kabupaten/Kota 2002-2012(persen)

Krisis moneter global terasa pengaruhnya dalam tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Fakta yang terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Dari gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa dampak krisis moneter global tahun 2008 berimplikasi terhadap perekonomian Jawa Barat, hal tersebut terlihat dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi hampir disetiap Kabupaten/Kota pada tahun 2008.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota 2007-2011 (Persen)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Kab. Bogor	6.04	5.58	4.14	5.09	5.96	5.36
Kab Sukabumi	3.98	3.9	3.65	4.02	4.07	3.97
Kab Cianjur	4.18	4.04	3.93	4.53	4.74	4.28
Kab Bandung	5.92	5.3	4.34	5.88	5.94	5.48
Kab Garut	4.76	4.69	5.57	5.34	5.48	5.17
Kab Tasikmalaya	4.33	4.02	4.15	4.27	4.32	4.22
Kab. Ciamis	5.01	4.95	4.92	5.07	5.11	5.01
Kab Kuningan	4.22	4.28	4.39	4.99	5.43	4.66
Kab Cirebon	5.35	4.91	5.08	4.96	5.03	5.07
Kab Majalengka	4.87	4.57	4.73	4.59	4.67	4.69
Kab Sumedang	4.64	4.58	4.76	4.22	4.82	4.60
Kab Indramayu	2.65	4.55	1.87	4.03	4.89	3.60
Kab Subang	4.85	4.33	4.63	4.34	4.45	4.52
Kab Purwakarta	4.02	4.87	5.28	5.77	6.4	5.27
Kab Karawang	6.36	10.84	7.4	11.87	8.97	8.33
Kab Bekasi	6.14	6.07	5.04	6.18	6.26	5.94
Kab. Bandung Barat	5.35	6.95	4.64	5.47	5.75	5.60
Kab Kota Bogor	6.09	5.98	6.02	6.14	6.19	6.08
Kota Sukabumi	6.51	6.11	6.14	6.11	6.31	6.24
Kota Bandung	8.24	8.17	8.34	8.45	8.73	8.39
Kota Cirebon	6.17	5.64	5.05	3.81	5.93	5.32
Kota Bekasi	6.44	5.94	4.13	5.84	7.08	5.89
Kota Depok	7.04	6.42	6.22	6.36	6.58	6.52
Kota Cimahi	5.03	4.77	4.63	5.3	5.56	5.06
Kota Tasikmalaya	5.98	5.7	5.72	5.73	5.81	5.79
Kota Banjar	4.93	4.82	5.13	5.28	5.35	5.10

Berdasarkan data BPS dalam tabel 1.2 menyatakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu terdapat di daerah Kota Bandung sebesar 8,39%. Hal ini dikarenakan kota Bandung dapat dikatakan sebagai pusat aktivitas perekonomian Jawa Barat. Dalam hal ini kota Bandung menjadi penarik bagi kota-kota disekitarnya. Kota Bandung telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya, dampak yang terjadi semakin besarnya permintaan khususnya barang konsumsi dan jasa di Kota Bandung yang memiliki terhadap perkembangan positif terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 sampai dengan 2011 di beberapa daerah mengalami kenaikan kecuali, daerah seperti Kabupaten Kuningan yang mengalami penurunan terus menerus dan pada tahun 2008 justru mengalami kenaikan sebesar 0,6% dari 4,22% pada tahun 2007 dan 4,28% tahun 2008. Begitu pun dengan Kabupaten Karawang yang mengalami kenaikan pada 2008 sebesar 0,7%.

Laju pertumbuhan ekonomi yang paling rendah adalah daerah Kabupaten Indramayu yang mencapai rata-rata 3,60. Hal tersebut dikarenakan telah terjadi penurunan yang drastis dialami oleh Kabupaten Indramayu pada tahun 2005 sebesar -7,82% yang sebelumnya tahun 2004 mencapai 4,16%. Penurunan yang terjadi karena anjloknya produktivitas di sektor migas, karena Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang kaya akan migas.

Beberapa daerah masih belum menikmati hasil pertumbuhan ekonomi yang terjadi, membuat daerah tersebut menjadi lambat dan berdampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi menjadi menurun. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Jawa Barat cenderung melambat walau tetap tumbuh. Namun pertumbuhannya masih belum optimal dibandingkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilihat dari tujuh kabupaten/kota mampu menguasai 63,18% perekonomian Jawa Barat. Tujuh daerah tersebut umumnya adalah daerah-daerah yang berada Jawa Barat bagian Utara dan Tengah. Sementara itu daerah-daerah yang berada di bagian selatan seperti Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya dan Kab. Ciamis kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan 7 daerah

tersebut.³ Untuk itu, Menteri Perindustrian (Menperin) mengingatkan akselerasi pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan merata di seluruh wilayah.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat begitu penting karena dari sisi geografi, Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintah dan ekonomi nasional sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pasar, keuangan dan permodalan, serta pengembangan teknologi. Namun, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mulai lambat dari tahun 2011.⁴

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari sisi ekspor. Pertumbuhan ekspor di Jawa Barat pada triwulan II/2012 dinilai masih cukup lamban. Pertumbuhannya belum sesuai harapan untuk mengejar target pertumbuhan 6,25% sampai akhir 2012. Pertumbuhan ekspor Jawa Barat baru mencapai 0,32%. Posisi ini masih sangat lemah apabila Jawa Barat mengandalkan ekspor sebagai penggerak ekonomi rakyat.⁵ artinya semakin daerah itu melakukan kegiatan ekspor, dampaknya akan memicu naiknya pertumbuhan ekonomi. Serta, pendapatan hasil daerah pun akan bertambah.

³ *Op.cit*

⁴ Sabar, Melambat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, 10 Juni 2013 <http://www.tubasmedia.com/berita/melambat-pertumbuhan-ekonomi-jawa-barat/>(diakses 15 April 2014)

⁵ Arif Budiman, *Pertumbuhan ekspor Jawa Barat lemah*, <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/08/06/34/663411/pertumbuhan-ekspor-jabar-lemah> 6 Agustus 2012 (diakses 15 April 2014)

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu faktor sebagai kemajuan ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang dapat dilihat dari faktor tenaga kerja dalam suatu wilayah. Pertumbuhan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling dominan. Secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau pembentukan *output*. Karena sumber investasi yang ada tidak akan bergerak tanpa adanya tenaga kerja. Namun, disisi lain pertumbuhan tenaga kerja yang sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian suatu daerah, yakni mencakup masalah penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian

suatu daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Sejak ditetapkan UU No.25/tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.32/tahun 2004 tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa pembangunan daerah diserahkan pada masing-masing daerah, pemerintah pusat hanya sebagai pengawas/pengontrol, maka mau tidak mau masing-masing daerah harus berusaha memaksimal mungkin untuk menentukan kebijakan dan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengejar ketertinggalan daerah masing-masing.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran adanya pendapatan yaitu investasi. Investasi atau akumulasi modal faktor yang tak kalah penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal

seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Artinya semakin banyak tabungan yang kemudian diinvestasikan, maka akan semakin cepat terjadi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi secara riil, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada setiap tabungan dan investasi tergantung dari tingkat produktivitas investasi tersebut.

Tahun 2003 telah ditetapkan sebagai tahun investasi bagi Indonesia. Alasannya perancangan tersebut diantaranya karena masih terbatasnya kemampuan negara membiayai investasi, sehingga Indonesia sangat memerlukan kehadiran para pemodal asing. Hal ini diperlukan untuk membuka usaha baru atau memperluas usaha yang telah mereka lakukan di negara Indonesia.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) angka persetujuan investasi di Indonesia, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan yang sangat tajam selama semester I tahun 2002 dibandingkan tahun 2001. PMDN turun drastis hingga 72% dari Rp. 39,788 triliun dengan 130 proyek menjadi Rp. 11,114 triliun dengan 80 proyek. Sedangkan PMA turun 42% dari 4,312 miliar dollar AS dengan 678 proyek menjadi 2,520 miliar dollar AS dengan 506 proyek (BKPM, 2003).

Kemerosotan angka persetujuan investasi itu disebabkan oleh persepsi para investor asing terhadap Indonesia yang masih negatif dikarenakan krisis moneter tahun 1998 dan iklim investasi yang masih belum kondusif.

Tabel 1.3
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Barat

Tahun	PMA (Juta Rp)	PMDN (Juta Rp)
2007	12.197.398	11.347.889
2008	25.526.575	4.075.170
2009	26.045.415	4.167.417
2010	27.942.072	18.660.542
2011	41.445.630	7.305.546

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.3, penanaman modal asing maupun modal dalam negeri mengalami fluktuasi. Penanaman modal asing mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 sebesar 12.197.398 (Juta Rp) dan pada tahun 2011 sebesar 41.445.630 (Juta Rp) dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang cukup besar. Sedangkan penanaman modal dalam negeri mengalami fluktuasi tiap tahunnya, tahun 2008 adalah mengalami penurunan yang paling kecil dalam kurun waktu 2007-2011 sebesar 4.075.170 (Juta Rp).⁶ Semester pertama tahun 2012 angkanya hanya mencapai Rp. 175 triliun.⁷ Dalam kondisi seperti ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menjadi lebih lambat.

Investasi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat tidak setiap Kabupaten/Kota ada nilai investasinya. Hal ini dikarenakan rendahnya iklim investasi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi yang terjadi rata-rata di setiap tahunnya yaitu daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung,

⁶ BPS Jawa Barat,realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

⁷ Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melambat.
<http://jabartoday.com/ekonomi/2013/09/10/2019/14556/pertumbuhan-ekonomi-jabar-melambat> 10 september 2013 (diakses 1april2014)

Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cirebon.

Anggota Dewan Pakar Forum ekonomi Jawa Barat Teti Armiarti mengatakan kemungkinan terburuk ekonomi Jawa Barat bisa melambat, menurut dia faktor yang mampu menghambat investasi di kawasan ini yaitu infrastruktur dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit. Kedua faktor tersebut mempengaruhi minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi mengenai infrastruktur serta perizinan yang rumit berakibat pada melemahnya daya saing Jawa Barat.⁸ Hambatan lainnya investasi di Jawa Barat peran investor lokal masih kalah dengan investor mancanegara. Hal itu tercermin pada tingkat kebergantungan Jawa Barat pada penanaman modal asing (PMA) yang melebihi 75 persen. Penyebaran investasi pun masih belum merata, investasi berlangsung diwilayah yang menjadi kawasan industri dan penopang Jakarta yaitu Karawang dan Bekasi.

Melihat kondisi tersebut Jawa Barat perlu meningkatkan investasi dan berupaya menciptakan iklim yang kondusif sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Hal itu didasari oleh keinginan kuat oleh Gubernur Jawa Barat dan membuat investasi yang lebih merata, karena investasi yang lebih merata dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi, konsumsi rumah tangga dan ekspor neto. Dilihat

⁸ Arif Budianto, Ekonomi Jawa Barat 2014 diprediksi lebih lambat, <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/11/06/33/802504/ekonomi-jabar-2014-diprediksi-lebih-lambat> 6 November 2013 (1April2014)

dari sisi penawaran agregat, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain jumlah tenaga kerja adalah teknologi. Kemajuan teknologi terjadi karena inovasi atau hal-hal baru dalam mengangani pekerjaan tradisional. Kemajuan teknologi dapat berlangsung sedemikian rupa sehingga menghemat pemakaian modal atau tenaga kerja. Penggunaan teknologi yang semakin tinggi sangat memacu pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari peningkatan *ouput*. Namun, karena jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit apabila teknologi yang digunakan semakin tinggi, maka hal ini akan menimbulkan *Trade Off* antara efisiensi produktivitas dan kesempatan kerja.⁹ Dilihat dari sisi permintaan dipengaruhi dengan pengeluaran pemerintah dan penanaman modal juga konsumsi rumah tangga dan ekspor neto yang keempatnya merupakan komponen dari pengeluaran agregat. Peranan dari pengeluaran agregat jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi dalam menentukan tingkat kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan suatu tujuan bagi semua daerah di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah karena begitu kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhinya tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Maka peneliti tertarik

⁹ Prathama Prahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001) h. 145

untuk membahas mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh Teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Barat?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah pertumbuhan ekonomi memiliki penyebab yang sangat luas dan kompleks. Karena peneliti memiliki kebatasan baik dari segi dana, waktu dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi pada masalah “Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004 - 2012”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat?

E. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang akan membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perekonomian di daerah tentang pertumbuhan ekonomi serta sebagai bahan informasi dan peneliti dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan

arah dan strategi pembangunan dimasa yang akan datang serta sebagai bahan evaluasi terhadap investasi dan pengeluaran pemerintah serta kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets dalam buku Todaro pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.¹⁰

Menurut Wijaya Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi output riil.¹¹

Pertumbuhan perekonomian berhubungan dengan kenaikan dari output perkapita sehingga ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk. Lain halnya menurut Arsyad pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan

¹⁰ Michael P. Todaro, *Op. Cit.*, h. 144

¹¹ Faried Wijaya, *Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro*, (Yogyakarta: BPF, 2000), h. 264-265

Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.¹² Namun pada umumnya mengartikan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan GDP/GNP saja.

Sukirno berpendapat bahwa “Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.”¹³ Menurut Nanga juga mengungkapkan hal serupa “Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa.”¹⁴ Bannock menambahkan “yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.”¹⁵

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam kasus perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto.

¹² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke3*, STIE YKPN 2006 h. 42

¹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9

¹⁴ Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 279

¹⁵ Graham Bannock, R.E Baxter dan Evan Davus, *A Dictionary of Economics*, (Inggris: Penguin Books Ltd, 2004) h. 245

Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah tidak jauh berbeda pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Menurut Tarigan yang dimaksud dalam pertumbuhan ekonomi wilayah atau regional adalah “tambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.”¹⁶ Tarigan menjelaskan bahwa “Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi didaerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi).¹⁷ Teori yang membicarakan pertumbuhan regional dimulai dari teori yang dikutip dari ekonomi makro/ekonomi pembangunan dengan mengubah batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional.

Menurut Tarigan, “ teori pertumbuhan yang dikutip dari ekonomi makro adalah berlaku untuk ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk wilayah yang bersangkutan.”¹⁸ Dengan demikian pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai konsep pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan faktor - faktor yang mempengaruhinya, hanya yang membedakan adalah ruang lingkup wilayah operasinya, misalnya daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan fiskal dan moneter.

¹⁶ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara) 2006, h.

¹⁷ Robinson Tarigan, *Ibid*, h.46

¹⁸ Robinson Tarigan, *Ibid* h.47

Salah satu cara untuk dapat melihat perkembangan ekonomi suatu daerah harus dilakukan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. PDRB merupakan nilai pendapatan bersih secara riil dari produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu. Nilai pendapatan bersih tersebut adalah balas jasa dari faktor produksi yang ikut serta dalam kegiatan produksi dalam menciptakan barang dan jasa. Untuk mencapainya maka perubahan harga terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya perlu dihilangkan.

Dari sisi metode perhitungan, nilai PDRB didapatkan dengan empat metode yaitu dengan pendekatan produksi, pendapatan, pengeluaran, dan alokasi. Metode umum yang sering digunakan adalah melalui pendekatan produksi dan pengeluaran.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDRB, secara umum dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto satu periode sebelumnya

Rumus tersebut hanya laju pertumbuhan sesaat. Pakar ekonomi, wirausahawan dan pemerintah sering tertarik untuk mengetahui laju pertumbuhan dari variabel - variabel ekonomi tertentu pada suatu periode untuk kepentingan suatu keputusan. Dalam bukunya Gujarati menunjukkan

bagaimana analisis regresi dapat digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan semacam itu, yaitu cara logaritma.¹⁹

b. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi mencoba dan membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan faktor - faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sulistiyono dalam jurnalnya “Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari sisi permintaan dan atau penawaran agregat.”²⁰ Secara ringkas dia menjelaskan:

Pada sisi penawaran, faktor penting dalam pembentukan pertumbuhan barang modal (K) dan tenaga kerja (L). Berdasarkan teori pertumbuhan neo klasik dapat dijelaskan melalui fungsi produksi modern yang telah memasukkan unsur endogenitas dan eksternalitas dalam pembangunan ekonomi: $Y = f(K, L, M, E, T)$, sedangkan pada sisi permintaan, penggunaan PDRB melalui empat komponen, bila dirumuskan menjadi $Y = (C + I + G + (X - M))$. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah modal (K), jumlah tenaga kerja (L), input antara/majerial (M), energy (E), teknologi (T), konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto yang merupakan sektor luar negeri (X-M).²¹

Adapun beberapa teori pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith, David Ricardo,

¹⁹ Damodar N. Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 221-224

²⁰ Bambang Sulistiyono, *Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Terdidik Pertumbuhan Tabungan Masyarakat, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Regional Periode 1993.1-2006.4, Dalam Jurnal Paradigma, September 2008, Vol.12, No. 3*, h. 139

²¹ Bambang Sulistiyono, *Ibid*, h. 139-140

Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori tersebut hukum tambahan yang semakin menurun, hal ini yang menjadi pembahas Ricardo dan Malthus, menyebabkan tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi. Apabila kondisi optimal telah dicapai maka tambahan tenaga kerja justru akan menurunkan tingkat produksi (*output*). Menurut Raharja dan Manurung

“Pada saat kondisi optimal, penambahan tenaga kerja dapat meningkatkan output dan yang harus dilakukan adalah investasi fisik (barang modal) dan SDM yang menunda terjadinya gejala hukum tambahan yang semakin menurun. Penambahan tenaga kerja akan meningkat *output* (PDB).”²²

2) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian akan bertambah.²³ Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal-produksi tetap nilainya, dan (iv)

²² *Ibid*, h 148

²³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 450

perekonomian terdiri dari dua sektor.²⁴ Dalam analisisnya Harrod-Domar menunjukkan bahwa,

Walaupun pada satu tahun tertentu barang - barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun sekarang yaitu $AE=C+I$, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi tinggi pada tahun berikutnya.²⁵

Dengan kata lain, investasi berlaku dalam tahun sekarang akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun berikutnya.

Pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Artinya apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk menghasilkan barang-barang.

Apabila pengeluaran agregat meliputi komponen lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor berdasarkan teorinya dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang sedemikian, barang -barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G_1 + (X-M)_1$ dimana $I_1 + G_1 + (X-M)_1$ sama dengan $(I+\Delta I)$.²⁶

Analisis diatas dapat pula disimpulkan bahwa analisis Harrod - Domar dilihat dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan

²⁴ Sadono Sukirno, Makroekonomi: Teori Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 435

²⁵ *Ibid*, h. 435

²⁶ *Ibid*, h. 436

ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I+G+(X-M)$ terus menerus bertambah. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan terus menerus mengalami peningkatan apabila investasi dan pengeluaran pemerintah juga terus ditambah.

3) Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini menyatakan perlunya teknologi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Unsur ini diyakini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut kaum neo-klasik, laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan dalam penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pendapat ini sepenuhnya berpangkal pada pemikiran aliran klasik yang menyatakan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat modal akan tetap sepenuhnya digunakan dari masa ke masa.

Menurut Sukirno teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pengembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertumbuhan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT = tingkat perkembangan teknologi²⁷

²⁷ Sadono Sukirno, *Ibid* h. 437

Analisis Solow menyimpulkan bahwa: *Faktor terpenting yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.*²⁸

Lebih lanjut lagi dapat diasumsikan bahwa PDB per kapita semata-mata ditentukan oleh stok modal per tenaga kerja.

$$Q = f(K,L) \text{ Keterangan : } Q = \text{Output}$$

$$K = \text{barang modal}$$

$$L = \text{tenaga kerja}^{29}$$

Berdasarkan rumus ini dapat dilihat bahwa besar kecilnya *output* yang dihasilkan tergantung pada kapital dan tenaga kerja. Untuk menjaga agar perekonomian dapat mempertahankan tingkat *output*-nya, stok barang modal per kapita tidak boleh berkurang.

Model pertumbuhan Solow-Swan juga menyatakan bahwa pada tingkat pertumbuhan yang tetap sama peubah, baik sisi output maupun sisi input, bergerak dalam proporsi yang sama. Model pertumbuhan Solow menghubungkan antara output perkapita dengan stok modal per kapita, dengan menggunakan fungsi produksi. Model pertumbuhan ini akan kehilangan momentumnya ketika pertumbuhan modal secara relatif jauh lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Keadaan ini mengaplikasikan bahwa perbandingan jangka panjang antara modal dan tenaga kerja haruslah konstan. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik

²⁸ *Ibid*, h. 437

²⁹ Prahtama Prahardja dan Mandala Manurung, *teori ekonomi makro (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI) 2005*, h. 144

Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi. Berdasarkan teori neo-klasik, pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila terjadi penambahan pada faktor-faktor produksi barang modal dan tenaga kerja.

4) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan schumpeter mengemukakan dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, golongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Teori Schumpeter menganalisis bahwa:

Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara, maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan - perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.³⁰

Berdasarkan teori pembangunan yang diungkapkan schumpeter tersebut, para pengusaha melalui kegiatan inovasinya akan meningkatkan

³⁰ Sadono Sukirno, *Ibid* h. 435

investasi dan untuk selanjutnya akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, melalui pengusaha, pengusaha investasi akan mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat. Dalam dunia nyata, sangat sulit untuk mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Oleh karena itu, angka yang digunakan untuk menaksir perubahan output adalah nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto untuk daerah.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan barang dan jasa (*output*) guna meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur suatu negara dalam kenaikan *output* atau tingkat wilayah yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB tanpa memperhatikan pengaruh harga yaitu PDRB yang disajikan atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan yaitu dengan memperhatikan pengaruh harga. PDRB dapat dilihat dengan secara total maupun per kapita.

2. Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan- peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Sukirno adalah komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat³¹.

Dalam bukunya, Boediono mengemukakan investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.³² Hal serupa diungkapkan oleh Suparmoko, investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, kantor dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi, termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan (*inventory*). Jadi, investasi adalah pengeluaran yang menambah persediaan kapital.³³ Menurut Sukirno menjelaskan pengertian investasi itu sendiri, yaitu:

³¹ Sadono Sukiro., *opcit.* h.15

³² Boediono, *perekonomian indonesia, 2000* h.54

³³ M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, (Yogyakarta: BPFE), 1999, h. 71

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa tersedia dalam perekonomian.³⁴

Para pelaku investasi adalah pemerintah, swasta, dan kerja sama antara pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah umumnya dilakukan tidak dengan maksud mendapatkan keuntungan, tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit dan sebagainya. Bagi swasta lebih tertarik pada jenis investasi yang ditujukan untuk memperoleh laba yang biasanya didorong karena adanya pertambahan pendapatan.

Adapun ciri-ciri dari barang-barang investasi antara lain:

- a. Memiliki manfaat yang umumnya lebih dari satu tahun
- b. Nilainya relatif besar dibandingkan dengan nilai output yang dihasilkan
- c. Manfaat dari penggunaan barang tersebut dapat dirasakan untuk jangka waktu yang panjang

Rahardja dan Manurung mempunyai pengertian lainnya bahwa Investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup (penghasilan atau kekayaan) dimasa mendatang.³⁵

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas

³⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h. 121

³⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, (Jakarta: FEUI, 2004), h. 237

produksi atau pendapatan di masa mendatang.³⁶

Samuelson dan Nordhaus menjelaskan investasi atau pembelian barang dan modal meliputi penambahan stok modal atau barang modal disuatu negara seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang-barang investaris dalam waktu satu tahun.³⁷ Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro adalah:

- 1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- 2) Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- 3) Kemajuan teknologi.³⁸

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (output) dan pendapatan di kemudian hari. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat,

³⁶ Gregory Mankiew, *Makro Ekonomi*, 2006 h. 144

³⁷ Paul A. Samuelson dan William D Nordhaus, *Makro Ekonomi, Edisi Keempatbelas*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 108

³⁸ Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan, 2004 h.58

- sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi
 - 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.³⁹

Dumairy berpendapat bahwa:

Gambaran mengenai perkembangan investasi dari waktu ke waktu dapat diketahui dengan 3 macam cara, yaitu:

- 1) Menyoroti kontribusi pembentukan modal domestik bruto dalam konteks permintaan agregat.
- 2) Mengamati data-data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)
- 3) Menelaah perkembangan dana investasi yang disalurkan oleh dunia perbankan.⁴⁰

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat bahwa investasi dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing.

Beberapa faktor yang penting juga peranannya dalam menentukan investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian, sebagai berikut:

- 1) Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada pengusaha mengenai jenis-jenis usaha yang prospektif dan dilaksanakan di masa depan, dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memenuhi tambahan barang-barang modal yang diperlukan.
- 2) Tingkat bunga

³⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar MakroEkonomi, Edisi Keiga.2010* h.121

⁴⁰ Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 136

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha, dan para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanam, yaitu berupa persentase keuntungan netto (belum dikurangi dengan tingkat bunga yang dibayar), modal yang diperoleh lebih besar dari tingkat bunga.

3) Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan

Dengan adanya ramalan tentang kondisi dimasa depan akan dapat menentukan tingkat investasi yang akan tercipta dalam perekonomian. Apabila ramalan di masa depan adalah baik maka investasi akan naik. Sebaliknya, apabila ramalan kondisi ekonomi dimasa akan datang adalah buruk, maka investasi akan rendah.

4) Kemajuan teknologi

Dengan adanya temuan-temuan teknologi (inovasi), maka akan semakin banyak kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan oleh pengusaha, sehingga makin tinggi tingkat investasi yang dicapai.

5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya

Dengan bertambahnya pendapatan nasional maka tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat, daya beli masyarakat juga meningkat, total agregat demand meningkat yang pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya investasi lain (*included investment*).

6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka akan mendorong para pengusaha untuk menyediakan sebahagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk investasi-investasi baru.⁴¹

Menurut Rosyidi, jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok (bertujuan agar tidak terjadi jenis investasi yang masuk dalam dua pengelompokkan), antara lain⁴²:

1) Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional :

- a. *Autonomos Investment* (Investasi otonom), merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional. Jadi tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak mempengaruhi jumlah investasi yang dilakukan oleh

⁴¹ Sadono Sukirno, *Ibid.* h. 122

⁴² Suherman Rosyidi, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta:Erlangga,2000) h.169-172

pengusaha. Namun perubahannya dipengaruhi oleh tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, dan harapan pengusaha.

- b. *Induced Investment* (Investasi terimbas) adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.

2) Berdasarkan subjeknya

- a. *Public Investment* (Investasi pemerintah), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- b. *Private Investment* (Investasi Swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan mencari keuntungan

3) Berdasarkan alasannya

- a. *Domestic Investment* (Investasi dalam negeri), merupakan penanaman modal didalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri
- b. *Foreign Investment* (Investasi asing), yaitu penanaman modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri untuk digunakan didalam negeri guna mengoptimalkan sumberdaya yang masih belum termanfaatkan

4) Berdasarkan unsur pembentukannya

a. *Gross Investment* (Investasi Bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu. Investasi bruto ini meliputi berbagai macam investasi baik investasi otonom, investasi terimbas, investasi pemerintah, dan investasi swasta, maupun investasi dalam negeri dijumlahkan semua

b. *Net Investment* (Investasi Neto), merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan atau disebut investasi bersih.⁴³

Semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Investasi dimaksud memajukan pembangunan ekonomi selanjutnya, maka pertimbangan kriteria investasi seharusnya diarahkan kepada sektor-sektor yang "*growing points*" dalam perekonomian, yaitu pada bidang-bidang atau lapangan yang dapat memberi perkembangan yang lebih cepat, membutuhkan investasi tambahan yang cukup besar, tetapi mempunyai permintaan yang sudah tersedia, akan memberikan *external economies* yang sangat penting bagi industri-industri lainnya yang ada, dan akan menimbulkan permintaan akan produk-produk suplemen dan jasa-jasa.

Konsep investasi pada sektor-sektor yang bersifat *growing points*

⁴³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Jakarta: Erlangga, 2011) h. 188

mengandung suatu pandangan bahwa berbagai sektor dari perekonomian saling bergantung satu dengan lainnya. Kalau dikaitkan dengan perekonomian, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dalam arti investasi harus dilakukan pada beberapa sektor yang berbeda-beda sekaligus yang sifatnya saling komplementer dan interdependen. Dari investasi pada sektor *growing points*, yang saling komplementer dan interdependensi dapat dimulai serangkaian aksi dan reaksi yang lambat laun akan menyebabkan perubahan-perubahan diseluruh perekonomian⁴⁴.

Dapat disimpulkan bahwa investasi adalah pembelian barang modal meliputi penambahan stok modal atau barang modal disuatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi dan barang - barang investaris dalam waktu satu tahun yang dipakai untuk menghasilkan barang lain dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal di masa mendatang sebagai langkah awal pembangunan. Investasi dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperluas lapangan pekerjaan di masa depan bagi masyarakat.

⁴⁴ *Ibid.*, h.197

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tidak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak.

Menurut Sukirno mengungkapkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (*Government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Op.cit.* h .289

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut M. Suparmoko, pengeluaran pemerintah juga dapat dibedakan sebagai berikut⁴⁶:

1) Perbedaan antara Pengeluaran atau Belanja Rutin dan Pengeluaran atau Belanja pembangunan

- Pengeluaran Rutin atau Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional.

- Belanja Pegawai yaitu untuk pembayaran gaji atau upah pegawai termasuk gaji pokok dan segala macam tunjangan.

- Belanja Barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
- Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terjaga dengan baik.
- Belanja Perjalanan, yaitu biaya perjalanan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah.
- Pengeluaran Pembangunan atau belanja pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang direncanakan dalam Repelita. Dalam Pelita I, misalnya pembangunan dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian, dan dalam Pelita II tetap dititikberatkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, dan seterusnya.

Selain membiayai pengeluaran sektoral melalui departemen/lembaga, pengeluaran pembangunan juga membiayai proyek-proyek khusus daerah yang dikenal sebagai proyek Inpres (Instruksi Presiden), baik yang dilaksanakan oleh pusat maupun masing-masing daerah. Proyek-proyek Inpres ini terdiri atas bantuan pembangunan desa, bantuan pembangunan Dati II, bantuan pembangunan Dati I, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Kesehatan, Inpres

Pemugaran Pasar, Inpres Penghijauan dan Inpres Jalan/Jembatan. Selain itu dilaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang penentuannya diserahkan kepada daerah. Besarnya alokasi anggaran untuk bantuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara serta beberapa faktor yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah, seperti banyaknya penduduk dan luas wilayah. Dengan demikian proyek-proyek yang akan dibangun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.

- 2) Perbedaan antara *Current Expenditure* dengan *Capital Expenditure*.
 - *Current Expenditure* atau *Current Budget* (anggaran rutin), yaitu anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari termasuk belanja pegawai dan belanja barang serta belanja pemeliharaan.
 - *Capital Expenditure* atau *Capital Budget* (belanja pembangunan) yaitu rencana untuk pembelian capital (tetap).
- 3) Perbedaan *Obligatory Expenditure* dengan *Optional Expenditure*, antara *Real Expenditure* dengan *Transfer Expenditure* dan antara *Liquidated Expenditure* dengan *Cash Expenditure*.
 - *Obligatory Expenditure* atau pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang bersifat wajib yang harus dilakukan agar efektivitas pelaksanaan dapat terselenggara dengan baik. *Optional Expenditure* atau Pengeluaran Opsional adalah pengeluaran yang dilakukan pada saat tiba-tiba dibutuhkan.

- *Real Expenditure* atau pengeluaran nyata adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa. *Transfer Expenditure* adalah pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan mendapatkan barang dan jasa, jadi tidak ada *direct quid quo*.
- *Liquidated Expenditure* adalah pengeluaran pemerintah yang sudah diajukan dan disetujui oleh DPR atau DPRD. Semula dalam RAPBN/RAPBD setelah mendapatkan pengesahan menjadi APBN/APBD. *Cash Expenditure* adalah pengeluaran yang telah sungguh-sungguh dilaksanakan berupa pembayaran-pembayaran konkrit.

Sesuai dengan PEMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 dan 50, pengeluaran pemerintah daerah dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

- Belanja langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

- Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Struktur format APBN dan APBD sumber penerimaan dan pengeluaran.

APBN	APBD
1. Penerimaan dalam negeri dan hibah <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan pajak b. Pendapatan bukan pajak 2. Belanja negara <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja pusat b. Belanja daerah (Bagi hasil, DAU, dan DAK) 3. Keseimbangan primer 4. Surplus/ defisit 5. Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam negeri b. Luar negeri 	1. Penerimaan daerah <ul style="list-style-type: none"> a. PAD b. Dana perimbangan (Bagi hasil, DAU, dan DAK) c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 2. Belanja daerah <ul style="list-style-type: none"> a. Rutin b. Pembangunan 3. Surplus/ defisit 4. Pembiayaan

Dalam teori Keynes menyatakan persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan

(G) adalah Pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian. Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier effect*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (*over-heating*). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan

tambahan lapangan pekerjaan.

Dari uraian-uraian diatas pengeluaran pemerintah dapat disimpulkan bahwa belanja daerah atau pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang digunakan untuk diantaranya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemerilahaaran, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak tersangka, dan lain-lain yang ada dalam struktur APBD.

B. Hasil Penelitian yang Revelan

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Terdapat beberapa variabel *independen* (bebas). Muhammad Hidayat meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Variabel yang bebas adalah PMDN, Ekspor, Tenaga kerja dan infrastruktur (jalan).metode analisis yang di gunakan dalam penelitiannya adalah regresi linier berganda dengan data *time series* dari tahun 1995-2009. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PMDN, ekspor, tenaga kerja dan infrastruktur (jalan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan diperoleh F hitung sebesar 6,140 dan nila F tabel pada tingkat pengujian 95% adalah 3,48.

Sayekti suindyah dalam Jurnal Ekonomi ISSN 1411-0393 tahun 2009 meneliti tentang pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan analisis linear berganda yang menggunakan Logaritma Natural. Hasil nalaisis data menunjukkan investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai nilai yang lebih kecil dari nilai probilitasnya yaitu 0,05 ini berarti secara parsial ketiga variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ardi raharjo meneliti tentang pengaruh pengeluaran pemerintah investasi swasta dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kota Semarang tahun 1982-2003. Variabel bebas yang diteliti adalah pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan angkatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Bambang Sulistiyono jurnal lipi Vol. 2 nomor 3 September 2008 meneliti tentang pengaruh angkatan kerja terdidik, pertumbuhan tabungan masyarakat, pertumbuhan pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan

ekonomi regional periode 1993.1-2006.4. Hasil empiris dari penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien sebesar 0,268. Pertumbuhan angkatan kerja terdidik mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0,011 dan untuk variabel pertumbuhan tabungan masyarakat mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar -0,130.

Dwi Suryanto meneliti tentang Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008. Penelitian ini menggunakan salah satu asumsi FEM yaitu koefisien slope konstan tetapi intersepnya bervariasi antar individu, sehingga bentuk modelnya *fixed effect*. Model *fixed effect* harus memasukan variabel *dummy*, hal ini untuk menyatakan perbedaan intersep. Hasil penelitian ini adalah variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten.

C. Kerangka Teoretik

Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang ingin dicapai oleh perekonomian suatu negara/daerah dalam jangka panjang, tujuannya tidak lain

untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Investasi dan pertumbuhan ekonomi diuraikan secara sederhana namun jelas di dalam model pertumbuhan ekonomi. Investasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dikarenakan investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran dan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Ketika investasi tinggi, maka kebutuhan akan barang modal yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan output terpenuhi dengan baik, penambahan jumlah produksi akan menciptakan peningkatan dari nilai/balas jasa terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga akan terciptanya kenaikan pada nilai PDRB yang mengindikasikan pertumbuhan regional.

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan pembangunan.⁴⁷

Kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal akan berakibat terhadap peningkatan produksi barang dan jasa di dalam perekonomian. Peningkatan produksi barang dan jasa ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁴⁷ Tulus T.H Tambunan. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001) h. 121

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari sisi permintaan agregat dan atau penawaran agregat. Jika dijabarkan maka pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah modal (K), tenaga kerja (L), Teknologi (T), konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto.

Sejalan dengan tumbuhnya perekonomian, pemerintah memiliki pengeluaran berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Belanja tidak langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga Biaya langsung sama halnya dengan biaya pembangunan dan belanja tidak langsung sama halnya dengan biaya rutin.

Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi diterangkan dalam *Keynesian Cross* dimana peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak positif pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output (Mankiw,2003).

Apabila pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran pemerintah, maka akan mempengaruhi jalannya kegiatan produksi, dimana pengeluaran pemerintah merupakan salah satu faktor penting karena

menjadi pemicu proses pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian dana yang baik akan mempengaruhi peningkatan output, sehingga akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Dengan membandingkan nilai pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

Dengan demikian maka diduga, tingkat investasi baik dan pengeluaran pemerintah diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

B. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan deksprisi konseptual dan kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengaruh positif antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
- 2) Terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
- 3) Terdapat pengaruh positif investasi dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah - masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan dapat dipercaya tentang:

1. Seberapa besar pengaruh antara investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat
2. Seberapa besar pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

B. Objek Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 12 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi ekonomi. Sedangkan 12 kabupaten/kota dipilih karena dari data investasi menunjukkan bahwa daerah rata-rata mendapatkan investasi setiap tahunnya adalah 12 kabupaten/kota tersebut.

Data yang digunakan adalah data panel dengan menggabungkan data *time series* (rentang waktu) dan *cross section* (data silang) dari tahun 2004 hingga 2012. Waktu ini dipilih karena merupakan interval waktu yang paling

baik yakni setelah provinsi banten terlepas oleh Provinsi Jawa Barat .

C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *expost facto* dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif⁴⁸. Metode *Ex Post Facto* adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut⁴⁹. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni untuk memperoleh data berdasarkan runtun waktu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa tahunan dari Investasi dan pengeluaran pemerintah serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000. Data tersebut diambil dari tahun 2004 hingga 2012 yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sehingga data yang diperoleh berjumlah 108.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di BPS (Badan Pusat

⁴⁸ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.121

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Alfabeta, 2004), h.7

Statistik) yang beralamat di Jl. Sutomo No.8 Jakarta Pusat dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.44, Jakarta Selatan sebagai sumber data.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Konseptual

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan barang dan jasa (*output*) guna meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur suatu negara dalam kenaikan *output* atau tingkat wilayah yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB tanpa memperhatikan pengaruh harga yaitu PDRB yang disajikan atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan yaitu dengan memperhatikan pengaruh harga. PDRB dapat dilihat dengan secara total maupun per kapita.

b. Definisi Operasional

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat melalui PDRB daerah tersebut dengan memperhatikan jumlah penduduk. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang

diterbitkan secara berkala. Data yang akan digunakan adalah data output total 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2012. Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai PDRB riil atas dasar harga konstan tahun 2000.

2. Investasi

a. Definisi Konseptual

Investasi adalah pembelian barang modal meliputi penambahan stok modal atau barang modal disuatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi dan barang - barang investaris dalam waktu satu tahun yang dipakai untuk menghasilkan barang lain dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal di masa mendatang sebagai langkah awal pembangunan. Investasi dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Investasi tidak hanya meningkatkan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperluas lapangan pekerjaan di masa depan bagi masyarakat.

b. Definisi Operasional

Investasi dalam penelitian ini diperoleh dari data yang telah dihitung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari jumlah nilai investasi mengenai Realisasi Penanaman Modal baik berasal dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA) menurut 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dari tahun 2004 sampai dengan 2012.

3. Pengeluaran Pemerintah

a. Definisi Konseptual

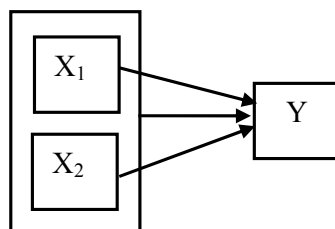
Belanja daerah atau pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang digunakan untuk diantaranya belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan lain-lain yang ada dalam struktur APBD

b. Definisi Operasional

Belanja daerah atau pengeluaran daerah dihitung berdasarkan pembelanjaan administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan lain-lain yang termasuk dalam struktur APBD. Dalam penelitian ini diperoleh laporan statistik dari Badan Pusat Statistik dengan publikasi statistik keuangan daerah Jawa Barat tahun 2004-2012

F. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel

Konstelasi pengaruh antar variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :
 Variabel Bebas (X₁) : Investasi
 (X₂) : Pengeluaran Pemerintah
 Variabel Terikat (Y) : Pertumbuhan ekonomi
 → : Menunjukkan Arah Pengaruh

G. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis

a. Analisis Data Panel

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antar deret waktu (*time series*) dan kerat lintang (*cross section*). Gujarati menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalnya pada data *cross section*, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama disurvei dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i \quad ; i = 1, 2, \dots, N \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

dimana N adalah banyaknya data cross section

Sedangkan persamaan model dengan time series adalah

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 X_t \quad ; t = 1, 2, \dots, T \quad \dots\dots\dots (3.2)$$

dimana T adalah banyaknya data time-series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari time series dan cross section, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Keterangan :

- Y = variabel pertumbuhan ekonomi
- X1 = investasi
- X2 = pengeluaran pemerintah
- i = cross section
- t = time series
- β_0 = konstanta
- β_1, β_2 = koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2
- μ = kesalahan pengganggu

Model tersebut dapat ditransformasikan kedalam persamaan logaritma :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

Keterangan:

- Y = Ketimpangan pembangunan ekonomi
- β_0 = Konstanta
- X1 = Penanaman modal asing
- X2 = Pengeluaran pemerintah
- β_1, β_2 = Koefisien yang dicari untuk mengukur pengaruh variabel X1 dan X2
- μ = Kesalahan pengganggu
- Ln = logaritma natural

Pemilihan model ini didasarkan pada penggunaan model logaritma natural (Ln). Damodar Gujarati menyebutkan bahwa salah satu

keuntungan dari penggunaan logaritma natural adalah memperkecil bagi variabel-variabel yang diukur karena penggunaan logaritma dapat memperkecil salah satu penyimpangan dalam asumsi OLS (Ordinary Least Square) yaitu heterokedastisitas.⁵⁰

Penggunaan data panel pada dasarnya merupakan solusi akan ketidaktersediaan data time series yang cukup panjang untuk kepentingan analisis ekonometrika. Menurut Hsiao dalam Greene keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerta lintang adalah:

- 1) Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degrees of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- 2) Data panel data, data lebih informatif, lebih bervariasi, yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section dan time series saja.
- 3) Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section.

b. Estimasi Model

1) Model Common Effect

Model *common effect* atau *pooled regression* merupakan model regresi data panel yang paling sederhana. Model ini pada dasarnya mengabaikan struktur panel dari data, sehingga

⁵⁰Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar* (Jakarta: Erlangga, 1997) h.68

diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu atau dengan kata lain pengaruh spesifik dari masing-masing individu diabaikan atau dianggap tidak ada. Dengan demikian, akan dihasilkan sebuah persamaan regresi yang sama untuk setiap unit cross section. Sesuatu yang secara realistis tentunya kurang dapat diterima. Karena itu, model ini sangat jarang digunakan dalam analisis data panel.

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-covarians residual, maka pada model *common effect*, terdapat 4 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu:

- a) *Ordinary Least Square (OLS)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- b) *General Least Square (GLS)/ Weight Least Square (WLS): Cross Sectional Weight*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*,
- c) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)/ Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)* atau *Maximum Likelihood Estimator (MLE)*, jika struktur matriks varians-kovarians residual diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*,

d) *Feasible Generalized Least Square (FGLS)* dengan proses *autoregressive (AR)* pada error term-nya, jika struktur matriks varians-kovarians residulnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada korelasi antar waktu pada residualnya.

2) *Model Fixed Effect*

Jika model common effect cenderung mengabaikan struktur panel dari data dan pengaruh spesifik masing-masing individu, maka model *fixed effect* adalah sebaliknya. Pada model ini, terdapat efek spesifik individu α_i dan diasumsikan berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati X_{it} .

Berdasarkan asumsi struktur matriks varians-kovarians residual, maka pada model *fixed effect*, terdapat 3 metode estimasi yang dapat digunakan, yaitu :

- 1) *Ordinary Least Square (OLS/LSDV)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat homoskedatik dan tidak ada *cross sectional correlation*.
- 2) *Weighted Least Square (WLS)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan tidak ada *cross sectional correlation*.

3) *Seemingly Uncorrelated Regression (SUR)*, jika struktur matriks varians-kovarians residualnya diasumsikan bersifat heteroskedastik dan ada *cross sectional correlation*

3) Model *Random Effect*

Pendekatan ini mengasumsikan *unobservable individual effect* (u_{it}) tidak berkorelasi dengan *regressor* (X) atau dengan kata lain u_{it} diasumsikan bersifat random. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *fixed effect* atau *random effect* atau keduanya memberikan hasil yang sama.

2. Uji Metode Estimasi data panel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Untuk menentukan apakah model panel data dapat diregresi dengan metode *common effect*, metode *Fixed Effect* (FE) atau metode *Random Effect* (RE), maka dilakukan uji-uji sebagai berikut:

1) Uji Chow

Uji Chow dapat digunakan untuk memilih teknik dengan metode pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) atau metode *Fixed Effect* (FE).

Prosedur Uji Chow adalah sebagai berikut:

a. Buat hipotesis dari Uji Chow

□ = model *common effect*

□ = model *Fixed Effect*

b. Menentukan kriteria uji

□ Apabila nilai F statistik $>$ F tabel, maka hipotesis ditolak yang artinya kita harus memilih teknik FE.

□ Apabila nilai F statistik $<$ F tabel, maka hipotesis diterima yang artinya kita harus memilih teknik PLS.

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode pendekatan *Fixed Effect* (FE) atau *Random Effect* (RE). Prosedur Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a. Buat hipotesis dari Uji Hausman: $=$ random effect dan $=$ fixed effect.
- b. Menentukan kriteria uji: apabila *Chi-square* statistik $>$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis ditolak, sehingga metode FE lebih tepat untuk digunakan. Dan apabila *Chi-square* statistik $<$ *Chi-square* tabel dan *p-value* signifikan, maka hipotesis diterima, sehingga metode RE lebih tepat untuk digunakan.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Menurut Greene “uji asumsi klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi

maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.”⁵¹
 Konsekuensi yang muncul ketika membangun model regresi dengan data panel adalah bertambahnya komponen residual, karena adanya dimensi cross section dan time series pada data. Kondisi ini menyebabkan matriks varian kovarian residual menjadi sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan model regresi klasik yang hanya menggunakan data *cross section* atau data *time series*.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali, Jika data tidak berdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.⁵²

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J_B test yang dilakukan dengan menghitung skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X^2 (chi-square) tabel, maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji normalitas adalah :

⁵¹ William H. Greene, *Econometric Analysis* (New York : New York University, 2002), p. 307

⁵² Imam Ghozali, *Ekonomika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), h. 110

$$JB = n \left[\frac{M_3^2}{6M_2^3} + \frac{(M_4 - 3)}{24} \right]$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

2 = varians

3 = slewness

4 = kurtosis

Jarque-Bera test mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil Jarque-Berra test lebih besar dari nilai chi-square pada $\alpha=5$ persen, maka H_0 ditolak yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil Jarque-Beta test lebih kecil dari nilai chi square pada $\alpha=5$ persen, maka H_0 diterima yang berarti error term berdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas berarti uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji white. Uji white menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen.

Untuk melihat apakah data mengandung heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai probabilitas dari Obs*R-squared. Jika nilai

probabilitas dari Obs*R-squared lebih besar dari $\alpha=5\%$ (0,05), maka data terbebas dari heteroskedastisitas yang artinya data bersifat homokedastisitas. Jika probabilitas dari Obs*R-squared lebih kecil dari $\alpha=5\%$ (0,05), maka data mengandung heteroskedastisitas yang artinya data tidak bersifat homokedastisitas, sehingga perlu diperbaiki.

Dalam pengambilan keputusannya adalah jika titik-titik dalam *scatterplot* membentuk suatu pola yang jelas dan teratur, maka terdapat heteroskedastisitas pada model penelitian. Namun jika titik-titik tersebar secara acak (*random*), tidak berpola, serta data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model penelitian.

4. Pengujian Kriteria Statistik

a. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁵³

Hipotesis penelitiannya:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

Artinya variabel X1 dan X2 secara serentak tidak berpengaruh terhadap Y.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$$

⁵³ Duwi Priyanto, *SPSS Analisa Korelasi, Regresi dan Multivariate* (Yogyakarta: Gava Media, 2009), h. 48

Artinya variabel X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap Y.

Kriteria pengambilan keputusannya, yaitu:

- a. $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima
- b. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak

Nilai F – hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$\frac{R^2/k-1}{(1-R^2) - (n-k)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi (residual)

K = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model persamaan

N = jumlah sampel

b. Uji t (Partial Test)

Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak.⁵⁴ Selain itu, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan uji statistik t maka dapat diketahui apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sesuai hipotesis atau tidak.

1) Hipotesis pengujian :

⁵⁴ Duwi Priyanto, *op.cit*, h.50

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_i : \beta_1 > 0$$

Kriteria pengujian:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak, maka salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan
- b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, H_0 diterima, maka salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya presentasi variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan ragam naik turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X. Dalam hal ini ragam naik turunnya Y seluruhnya disebabkan oleh X. Perhitungan koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus.⁵⁵

$$R^2 = \frac{EES}{TSS}$$

Keterangan : EES (*Explained of Sum Squared*) : jumlah kuadrat yang dijelaskan

TSS (*Total Sum of Squares*) : total jumlah kuadrat

Dimana nilai R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1, nilai $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$, berarti variabel bebas tidak bisa menjelaskan variabel perubahan variabel terikat, maka model dapat dikatakan buruk. Jika $R^2 = 1$, berarti

⁵⁵ Nachrowi Djalal Nachrowi, *Penggunaan Teknik Ekonometrika* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), h.22

variabel bebas mampu menjelaskan variabel perubahan variabel terikat dengan sempurna. Kondisi seperti dua hal tersebut hampir sulit diperoleh. Kecocokan model dapat dikatakan lebih baik kalau R^2 semakin dekat dengan 1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Variabel yang ada pada penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, yang dalam penelitian ini adalah investasi dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu variabel yang dipengaruhi, yang dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas harga berlaku maupun berdasarkan atas harga konstan. Kondisi laju pertumbuhan ekonomi 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam penelitian ini pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota 2004-2012 (000.000.000) Miliar Rupiah

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-Rata
Kab. Bogor	23.671	25.056	26.546	28.151	29.722	30.952	32.526	34.465	36.531	29,736
Kab Sukabumi	6.828	7.126	7.405	7.715	8.015	8.015	8.642	8.993	9.383	8,014
Kab Bandung	21.575	22.773	17.640	18.684	19.674	20.528	21.735	23.026	24.443	21,120
Kab Cirebon	6.038	6.344	6.670	7.027	7.372	7.746	8.130	8.539	8.950	7,424
Kab Subang	5.634	6.026	6.174	6.473	6.754	7.067	7.373	7.701	8.049	6,806
Kab Purwakarta	5.547	5.742	5.964	6.204	6.506	6.850	7.245	7.708	8.195	6,662
Kab Karawang	13.424	14.480	15.568	16.559	18.354	19.712	21.615	23.212	25.339	18,696
Kab Bekasi	38.977	41.319	43.793	46.481	49.302	51.790	54.989	58.433	62.068	104,684
Kota Bogor	3.361	3.567	3.782	4.013	4.253	4.509	4.785	5.081	5.394	4,305
Kota Bandung	19.875	21.371	23.043	24.942	26.963	29.228	31.697	34.464	37.558	27,682
Kota Bekasi	11.113	11.740	12.453	13.255	14.042	14.623	15.476	16.572	17.706	14,109
Kota Depok	4.441	4.750	5.066	5.423	5.771	6.130	6.519	6.949	7.446	5,833
Jawa Barat	160.484	170.294	174.104	184.927	196.728	207.150	715.732	235.143	251.062	255.069

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB)
Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Kabupaten/Kota 2004-2012 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	Kab. Bogor	5,58	5,85	5,95	6,04	5,58	4,14	5,09	5,96	5,99	5,57
2	Kab Sukabumi	3,96	4,35	4,12	3,98	3,90	3,65	4,02	4,07	4,34	4,04
3	Kab Bandung	5,66	5,78	5,80	5,92	5,30	4,34	5,88	5,94	6,15	5,64
4	Kab Cirebon	4,67	5,06	5,14	5,35	4,91	5,08	4,96	5,03	4,81	5,00
5	Kab Subang	7,26	6,91	3,36	4,85	4,33	4,63	4,34	4,45	4,52	4,96
6	Kab Purwakarta	3,72	3,51	3,87	4,02	4,87	5,28	5,77	6,40	6,31	4,86
7	Kab Karawang	10,78	7,87	7,52	6,36	10,84	7,40	11,87	8,97	5,44	8,56
8	Kab Bekasi	6,11	6,01	5,99	6,14	6,07	5,04	6,18	6,26	6,22	6,00
9	Kota Bogor	6,10	6,12	6,03	6,09	5,98	6,02	6,14	6,19	6,15	6,09
10	Kota Bandung	7,47	7,53	7,83	8,24	8,17	8,34	8,45	8,73	8,98	8,19
11	Kota Bekasi	5,38	5,65	6,07	6,44	5,94	4,13	5,84	7,08	6,85	5,93
12	Kota Depok	6,50	6,96	6,65	7,04	6,42	6,22	6,36	6,58	7,15	6,65
	Jawa Barat	6,09	5,96	5,69	5,87	6,02	5,35	6,24	6,30	6,07	6,3

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB). Hal ini tersebut mempunyai arti bahwa di daerah tersebut terjadi pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi 12 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota antara 4,04 % sampai dengan 8,56 %. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi daerah ini mengalami fluktuasi tiap tahunnya, yaitu dapat dilihat dari total Jawa Barat setiap tahunnya pada tahun 2004 sampai 2006 pada tahun 2003 yaitu 6,09 persen, lalu turun menjadi 5,96 dan 5,69 persen dan naik kembali pada tahun 2007 menjadi 5,87. Tahun 2008-2009 mengalami penurunan yaitu 6,02 menjadi 5,35 persen. Tetapi pada tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi kembali dan pada tahun 2012 sebesar 6,07.

Gambar 4.1



Sumber: BPS data diolah

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terbesar adalah Kabupaten Karawang dan Kota Bandung dengan nilai rata-rata 8,56 persen dan 8,19 persen. Ditengah kondisi ekonomi yang ketat kabupaten karawang dalam sektor industri yang sebagian besar merupakan industri alat angkutan, mesin dan peralatan (mobil dan motor) yang berorientasi ekspor produknya juga laku dipasar domestik, hal ini membuat pertumbuhan kabupaten karawang tumbuh, nilai PDRB kabupaten kawarawang dari sektor industri diperoleh pendapatan rata-rata sekitar 145,4 juta rupiah pertahun atau setara dengan pendapatan rata-rata per bulan sebanyak 12 juta rupiah per orang. Kabupaten karawang tahun 2008 semua sektor positif , pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan berpindahnya lapangan usaha para tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dari sektor industri. Kota bandung salah satu kota yang sangat dinamis. Pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dari survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik hal yang meningkatnya pertumbuhan ekonomi bandung dari sektor-sektor produksi dan banyaknya investor yang berinvestasi disektor-sektor yang cukup menguntungkan seperti hotel dan restoran. Sedangkan daerah yang masih rendah adalah Kabupaten sukabumi yaitu sebesar 4,04 persen. Hal ini dikarenakan dengan pertumbuhan pajak dikabupaten ini masih tergolong rendah, tingkat pendidikan yang rendah dan kegiatan produktivitas rendah ini artinya

PDRB bersifat semu tidak terefleksikan pada peningkatan taraf kemakmuran.

Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha tahun 2004-2012
(dalam Milyar)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	34.458	34.942	34.822	35.687	37.140	41.722	42.137	42.101	41.802
2	Pertambangan & Penggalian	7.705	7.143	6.982	6.677	6.850	7.424	7.465	7.085	6.576
3	Industri Pengolahan	96.978	105.334	114.300	122.703	133.757	131.433	135.595	144.010	149.677
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5.338	5.650	5.428	5.751	5.986	6.839	7.316	7.426	8.009
5	Konstruksi	6.602	7.781	8.233	8.928	9.731	10.299	11.810	13.483	15.318
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	45.529	47.260	50.719	54.790	56.938	62.702	70.083	75.770	84.524
7	Pengangkutan & Komunikasi	10.309	10.329	11.143	12.271	12.234	13.209	15.353	17.645	19.763
8	Keluangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	7.247	7.624	7.672	8.646	9.076	9.619	10.565	11.985	13.210
9	Jasa-jasa	15.837	16.821	18.200	18.728	19.495	20.158	21.900	23.606	25.527
	JUMLAH	230.003	242.884	257.499	274.181	291.207	303.405	322.224	343.111	364.406

Karakteristik suatu wilayah akan menentukan beragamnya kegiatan perekonomian wilayah tersebut sehingga dapat memberikan corak pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. PDRB sektoral di bagi kelompok per sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan, Pertambangan & penggalian. Sektor sekunder terdiri dari Industri pengolahan, Listrik, Gas & Air Bersih, Kontruksi dan sektor tersier terdiri dari Perdagangan, Hotel & Restoran, Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Semakin besar kontribusi suatu sektor akan semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat

bahwa setiap sektor berbeda dan mengalami fluktuasi hampir setiap tahunnya. Secara umum struktur ekonomi Jawa Barat masih didominasi oleh kelompok sektor sekunder dan tersier. Pada tahun 2012 kontribusi sektor tersier mencapai 44,04 persen diikuti oleh sektor sekunder 42,59 persen dan primer 13,38 persen. Sektor yang paling besar yaitu sektor perdagangan, hotel & restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sektor yang mengalami fluktuasi hampir setiap tahunnya yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan & perikanan dan sektor pertambangan & penggalian. Pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali pada sektor pertanian. Pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,08% dan tahun 2012 meningkat kembali. Sektor yang paling rendah pertumbuhannya yaitu sektor listik, gas dan air bersih dan sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor terbesar tertinggi yaitu sektor industri pengolahan.

2. Investasi

Investasi merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali harus menerapkan kebijaksanaan investasi di sektor-sektor publik, sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta.

Peningkatan peran serta dalam pembangunan ekonomi dengan penyediaan porsi investasi lebih besar kepada swasta. Sasaran investasi sektor swasta pada dasarnya dipisahkan menjadi 2 (dua) yakni melalui PMA/PMDN. Investasi yang dilakukan oleh swasta tersebut merupakan

wujud tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khusus.

Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh melalui pengambilan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melihat realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Barat.

Di Indonesia, investasi atau penanaman modal dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki *multiplier effect* yang mencakup penyerapan tenaga kerja, yang secara tidak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi disekitar lokasi bangunan industri atau proyek investasi.

Investasi di Jawa Barat mengalami fluktuasi rata-rata di setiap daerah dan setiap tahunnya. Provinsi Jawa Barat tidak tiap daerahnya memiliki investor yang berinvestasi di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh persepsi investor asing terhadap Indonesia yang masih negatif dikarenakan krisis moneter 1998 dan iklim investasi masih belum kondusif. Maka dari itu setiap daerah selalu berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi.

Tabel 4.4
Realisasi Investasi 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2012 (dalam juta)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Kab. Bogor	1.383.503	794.049	2.713.587	1.493.999	1.689.554	356.868	3.147.648	4.685.205	4.093.953	2.261.974
Kab Sukabumi	305.295	125.340	158.500	119.780	898.743	545.590	203.280	874.168	449.483	408.908
Kab Bandung	140.549	1.115.461	52.821	363.549	407.075	310.329	637.542	892.324	411.266	481.212
Kab Cirebon	387.702	85.140	7.420	532.730	2.000	631.685	3.203.760	4.582.364	6.671.172	1.789.330
Kab Subang	178.060	160.800	42.200	149.954	36.989	310.442	541.514	257.794	341.580	224.370
Kab Purwakarta	1.379.756	84.818	634.996	5.108.400	333.550	4.949.811	1.256.068	4.182.440	4.275.031	1.956.367
Kab Karawang	2.165.350	4.385.334	8.130.224	12.693.236	4.939.981	3.370.996	5.298.449	8.784.627	9.397.608	6.573.978
Kab Bekasi	6.053.558	21.050.071	9.610.091	7.692.119	11.302.357	8.202.597	8.019.492	16.165.580	20.302.782	12.044.294
Kota Bogor	39.240	12.440	5.750	8.250	204.210	26.230	69.640	968.304	16.290	150.039
Kota Bandung	2.055.603	350.112	190.263	378.060	2.841.131	4.047.070	7.876.548	2.206.704	3.621.887	2.213.890
Kota Bekasi	207.253	624.643	274.847	206.280	2.099.943	619.625	1.126.401	1.893.055	1.019.046	896.788
Kota Depok	428.480	88.173	98.230	220.567	2.627.960	385.620	816.022	3.097.672	203.830	885.172
Jumlah	14.724.349	28.876.381	21.918.929	24.369.364	27.383.493	23.326.318	32.196.364	48.590.237	50.803.928	30.243.262

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Tabel 4.5
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2004-2012 (dalam juta)

Kabupaten/Kota	2004		2005		2006		2007		2008	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Kabupaten Bogor	1.190.310	193.193	641.600	152.449	2.167.130	6.457	1.313.970	180.029	1.348.590	340.964
Kabupaten Sukabumi	136.900	168.395	32.840	92.500	153.480	5.020	119.780		275.250	623.493
Kabupaten Bandung	39.660	100.889	256.910	858.551	44.000	8.821	314.800	48.749	379.540	275.350
Kabupaten Cirebon	363.560	24.142	85.140		7.420		532.730		2.000	
Kabupaten Subang	178.060		145.570	15.230	42.200		136.340	13.614	16.520	20.469
Kabupaten Purwakarta	1.135.620	244.136	11.000	73.818	568.480	66.516	486.840	24.000	244.850	88.700
Kabupaten Karawang	1.999.460	165.890	4.115.320	270.014	3.610.760	4.519.464	3.208.940	9.484.296	4.605.970	334.011
Kabupaten Bekasi	5.370.810	682.748	19.696.010	1.354.061	9.199.320	490.771	6.248.670	1.443.449	10.614.120	688.237
Kota Bogor	39.030	210	12.440		5.750		8.250		204.210	
Kota Bandung	911.850	1,143,753	297.420	52.692	163.450	26.813	367.560	10.500	1.634.030	1.207.101
Kota Bekasi	166.540	40.713	192.940	431.703	192.580	82.267	206.280		1.818.010	281.933
Kota Depok	428.480		41.200	46.973	63.230	35.000	208.567	12.000	2.627.960	
JUMLAH	11.960.280	2.764.069	25.528.390	3.347.991	16.217.800	5.241.129	13.152.727	11.216.637	23.771.050	3.860.258

Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN
Kabupaten Bogor	2.895.310	673.376	2.477.950	669.698	4.426.690	258.515	3.139.170	954.783
Kabupaten Sukabumi	545.590		203.280		839.200	34.968	320.300	129.183
Kabupaten Bandung	155.240	155.089	294.400	343.142	492.870	399.454	243.320	167.946
Kabupaten Cirebon	136.890	494.795	2.885.640	318.120	4.554.870	27.494	1.079.350	5.591.822
Kabupaten Subang	211.530	98.912	484.680	56.834	233.000	24.794	261.350	80.230
Kabupaten Purwakarta	4.851.090	98.721	761.900	494.168	4.055.810	126.630	4.194.910	80.121
Kabupaten Karawang	2.876.970	494.026	2.989.750	2.308.699	6.055.480	2.729.147	9.075.700	321.908
Kabupaten Bekasi	6.701.880	1.500.717	5.052.900	2.966.592	12.228.770	3.936.810	19.313.290	989.492
Kota Bogor	16.030	10.200	69.640		633.790	334.514	15.550	740
Kota Bandung	155.240	260.177	372.690	7.503.858	696.040	1.510.664	1.080.660	2.541.227
Kota Bekasi	508.280	111.345	342.610	783.791	1.812.310	80.745	729.780	289.266
Kota Depok	233.620	152.000	722.760	93.262	1.537.330	1.560.342	203.830	
JUMLAH	19.287.670	4.049.358	16.658.200	15.538.164	37.566.160	11.024.077	39.657.210	11.146.718

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai investasi PMA lebih relatif meningkat setiap tahunnya dibandingkan nilai investasi PMDN sendiri. Hal ini dapat di artikan bahwa kontribusi penanaman modal dalam negeri rendah. Penanaman modal asing tertinggi pada tahun 2012 sebesar 39.657.210.000.000. Nilai penanaman modal dalam negeri paling tinggi pada tahun 2010 sebesar 15.538.164.000.000. Perizinan atau birokrasi yang berbelit-belit membuat investor dalam negeri merelokasikan investasinya ke daerah lain. Dampaknya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi pada daerah Kabupaten Bekasi. Investor asing relatif banyak berinvestasi di daerah tersebut karena Kabupaten Bekasi yang lokasinya yang strategis dan dekat dengan DKI Jakarta. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi pada daerah Kabupaten Karawang.

Begitu dengan tingkat Kabupaten/Kota, pemerintah daerah selalu berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sektor-sektor ekonomi yang dianggap dominan merupakan sektor ekonomi yang menjadi potensi bagi daerah tersebut.

Dalam tabel 4.4 menunjukkan realisasi investasi yang berasal dari investasi swasta yaitu penjumlahan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan 12 kabupaten/kota di Jawa Barat periode tahun 2004-2012. Provinsi Jawa Barat memiliki 26 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini 12 kabupaten/kota

yang menjadi sampel di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan 12 kabupaten/kota tersebut setiap tahunnya terdapatnya nilai investasi swasta baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Daerah yang tidak terdapat di penelitian ini terdiri dari Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat. Investasi di Provinsi Jawa Barat tidak semua daerah terdapat investor yang menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Pemerintah daerah perlu membangun lembaga pelayanan dan sistem pelayanan yang modern dan efisien agar investor tertarik menanamkan modalnya di daerah. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah secara gencar mempromosikan keunggulan wilayahnya kepada para investor.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan investasi memiliki pertumbuhan yang positif Provinsi Jawa Barat selama periode 2004-2012 mengalami fluktuasi. Realisasi investasi tertinggi terjadi di daerah Kabupaten Bekasi yaitu sebesar Rp 12.044.294 juta. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu titik yang dituju para investor untuk berinvestasi di Jawa Barat, salah satu penyebab meningkatnya investasi di Kabupaten Bekasi rendahnya harga lahan yang ditawarkan sehingga meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan dananya di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi yang dulu dikenal sebagai lumbung

padi sekarang lebih dikenal menjadi sektor industri. Banyaknya kawasan industri di kabupaten bekasi membuat daerah dikawasan ini menjadi sumber investasi yang besar. Sedangkan realisasi investasi terendah terjadi di daerah Kota Bogor sebesar Rp 150.039 juta. Hal ini dikarenakan total realisasi investasi tergolong rendah setiap tahunnya, hal ini menunjukkan adanya permasalahan pada iklim investasi, keterbatasan lahan untuk berinvestasi yang dipersepsikan oleh dunia usaha kurang kondusif, karena itu diperlukan komitmen yang kuat dan promosi dari pemerintah kota bogor agar dapat menarik investor.

Pada tahun 2008 rata-rata mengalami kenaikan. Namun, pada tahun 2009 rata-rata hampir mengalami penurunan seperti daerah kabupaten sukabumi, kabupaten bandung, kota bandung, kota bogor, kota bekasi, kabupaten karawang, kabupaten bekasi, dan kota depok. Pada tahun 2008 total realisasi 12 kabupaten/kota di jawa barat sebesar Rp. 27.383.493 juta, sedangkan pada tahun 2009 menurun sebesar Rp. 23.326.318 juta. Setiap tahunnya realisasi investasi tertinggi dirasakan oleh kabupaten bekasi pada tahun 2005 sebesar Rp. 21.050.071 juta.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang diukur dari pengeluaran rutin dan pembangunan mempunyai peranan dan fungsi cukup besar mendukung sasaran pembangunan dalam menunjang kegiatan pemerintah serta peningkatan jangkauan dan misi pelayanan yang secara langsung berkaitan

dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi. Layaknya pengeluaran masyarakat maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga PDRB akan meningkat. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengenai realisasi dan anggaran belanja pemerintah (*government expenditure*) yang tersusun dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat. Data realisasi pengeluaran pemerintah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2004-2012 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2012 dalam ribu rupiah

Kabupaten/Kota	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Kabupaten Bogor	937.018.985	1.039.361.810	1.374.744.400	1.692.601.210	1.978.664.000	2.380.595.223	2.516.354.090	3.198.116.870	3.363.413.760	2.053.430.038.666
Kabupaten Sukabumi	532.693.960	612.640.076	932.880.101	1.071.153.620	1.313.290.679	1.320.179.699	1.549.051.028	1.764.268.785	1.874.616.204	1.218.974.905.777
Kabupaten Bandung	1.187.399.259	1.135.532.110	1.618.704.800	1.962.177.060	1.553.765.000	1.704.152.000	2.093.853.549	2.350.772.521	2.645.284.571	1.805.737.874.444
Kabupaten Cirebon	564.528.281	616.243.940	865.932.885	1.016.241.510	1.131.773.234	1.190.594.398	1.356.526.480	1.750.302.860	1.995.468.757	1.165.290.260.555
Kabupaten Subang	497.444.132	501.913.220	681.954.890	946.975.275	1.059.345.000	1.045.615.420	1.110.508.203	1.310.177.222	1.416.947.256	952.320.068.666
Kabupaten Purwakarta	341.700.524	142.428.240	482.552.812	580.627.531	641.200.890	773.962.503	979.822.814	1.072.194.035	1.123.606.183	682.010.614.666
Kabupaten Karawang	615.131.268	641.093.729	947.900.610	1.049.282.344	1.245.559.982	1.356.593.574	1.478.725.477	1.977.728.204	2.363.601.553	1.297.290.749.000
Kabupaten Bekasi	683.368.316	714.864.940	1.060.180.100	1.318.882.859	1.516.380.376	2.038.392.181	1.782.205.526	1.926.031.272	2.420.015.375	1.495.591.216.111
Kota Bogor	341.778.053	385.449.762	545.381.081	632.442.953	736.632.000	818.430.032	960.407.758	1.036.822.288	1.279.226.445	748.507.819.111
Kota Bandung	986.243.885	1.096.592.281	1.301.547.185	1.629.508.553	2.145.988.347	2.453.725.000	2.461.711.591	2.858.379.462	3.634.707.922	2.063.156.025.111
Kota Bekasi	569.524.662	731.022.520	881.862.420	1.112.557.800	1.272.092.000	1.517.825.430	1.748.528.532	1.906.125.173	2.390.864.003	1.347.822.504.444
Kota Depok	369.955.270	467.451.907	581.345.467	868.425.905	889.719.496	959.839.912	1.105.462.686	1.373.748.108	1.551.869.450	907.535.355.666
JUMLAH	7.626.786.595	8.084.594.535	11.274.986.751	13.880.876.620	15.484.411.004	17.559.905.372	19.143.157.734	22.524.666.800	26.059.621.479	15.737.667.432.222

Tabel 4.7
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun
2004-2012 (dalam ribu rupiah)

Kabupaten/Kota	2004		2005		2006		2007		2008	
	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan
Kabupaten Bogor	583.204.152	353.814.833	622.805.935	416.555.875	769.126.487	605.617.913	800.578.470	892.022.740	1.058.754.000	919.910.000
Kabupaten Sukabumi	162.453.619	370.240.341	179.390.465	433.249.611	260.230.642	672.649.459	474.463.030	596.690.590	710.079.400	603.211.279
Kabupaten Bandung	240.436.828	946.962.431	230.590.751	904.941.359	330.526.931	1.288.177.869	1.167.253.440	794.923.620	1.031.054.000	522.711.000
Kabupaten Cirebon	124.767.335	439.760.946	182.503.935	433.740.005	252.549.096	613.383.789	536.532.410	479.709.100	682.296.176	449.477.058
Kabupaten Subang	163.533.581	333.910.551	195.077.072	306.836.148	195.677.719	486.277.171	548.115.568	398.859.707	671.946.000	387.399.000
Kabupaten Purwakarta	138.364.069	203.336.455	118.773.450	23.654.790	159.606.147	322.946.665	318.608.752	262.018.779	433.784.155	207.416.735
Kabupaten Karawang	196.436.398	418.694.870	215.113.401	425.980.328	272.925.651	674.974.959	613.425.876	435.856.468	802.216.328	443.343.654
Kabupaten Bekasi	241.937.647	441.430.669	269.932.297	444.932.643	394.406.094	665.774.006	516.808.703	802.074.156	728.831.977	787.548.399
Kota Bogor	78.758.070	263.019.983	113.053.570	272.396.192	168.603.171	376.777.910	292.270.639	340.172.314	406.688.000	329.944.000
Kota Bandung	430.112.126	556.131.759	397.033.287	699.558.994	462.078.039	839.469.146	975.607.175	653.901.378	1.237.199.490	908.788.857
Kota Bekasi	230.641.170	338.883.492	272.655.934	458.366.586	317.209.123	564.653.297	509.152.060	603.405.740	634.439.000	637.653.000
Kota Depok	113.548.951	256.406.319	136.639.799	330.812.108	177.746.342	403.599.125	416.047.253	452.378.652	459.815.793	429.903.703
JUMLAH	696.753.103	610.221.152	759.445.734	747.367.983	946.872.829	1.009.217.038	1.216.625.723	1.344.401.392	1.518.569.793	1.349.813.703

Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012	
	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan	Rutin	Pembangunan
Kabupaten Bogor	1.266.963.761	1.113.631.462	1.440.936.075	1.075.418.015	1.505.062.610	1.693.054.260	1.614.211.551	1.749.202.209
Kabupaten Sukabumi	879.041.388	441.138.311	985.202.695	563.848.333	1.059.017.013	705.251.772	1.123.901.534	750.714.670
Kabupaten Bandung	1.202.306.000	501.846.000	1.338.456.710	755.396.839	1.450.973.890	899.798.631	1.527.656.504	1.117.628.067
Kabupaten Cirebon	762.045.921	428.548.477	889.581.175	466.945.305	1.025.553.075	724.749.785	1.144.168.750	851.300.007
Kabupaten Subang	714.159.304	331.456.116	823.655.606	286.852.597	854.440.680	455.736.542	962.358.533	454.588.723
Kabupaten Purwakarta	500.245.378	273.717.125	646.966.927	332.855.887	664.745.027	407.449.008	738.579.244	385.026.939
Kabupaten Karawang	848.854.414	507.739.160	1.000.582.737	478.142.740	1.052.874.429	924.853.775	1.094.976.103	1.268.625.450
Kabupaten Bekasi	970.503.025	1.067.889.156	992.397.599	789.807.927	1.018.140.260	907.891.012	1.222.384.935	1.197.630.440
Kota Bogor	478.139.272	340.290.760	551.307.421	409.100.337	615.900.388	420.921.900	635.979.536	643.246.909
Kota Bandung	1.341.803.000	1.111.922.000	1.349.282.658	1.112.428.933	1.494.985.586	1.363.393.876	1.937.415.321	1.697.292.601
Kota Bekasi	716.987.418	800.838.012	793.122.458	955.406.074	932.607.042	973.518.131	1.053.505.730	1.337.358.273
Kota Depok	492.104.125	467.735.787	585.141.765	520.320.921	614.673.820	759.074.288	616.124.126	935.745.324
JUMLAH	1.759.067.886	1.581.367.249	2.026.077.840	1.595.738.936	2.119.736.430	2.452.128.548	2.230.335.677	2.684.947.533

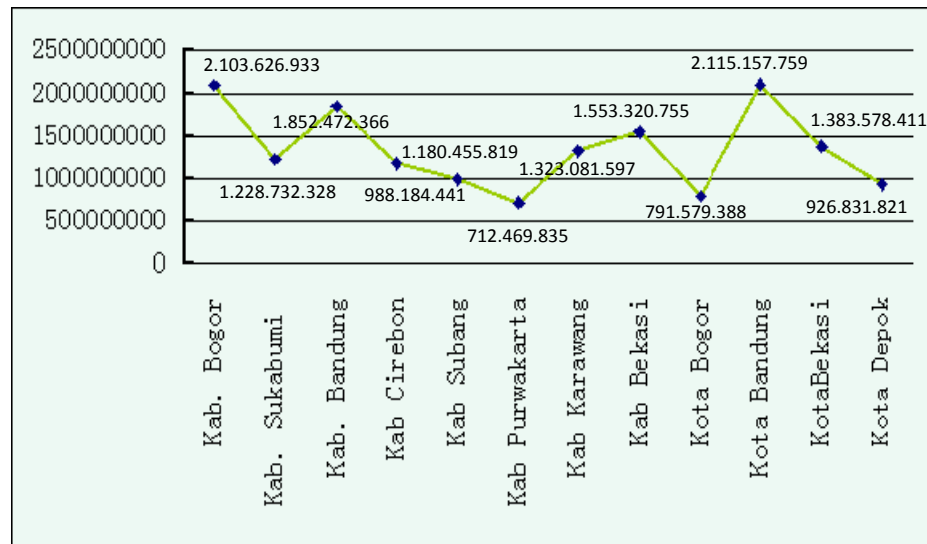
Pada tabel 4.6 di atas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah dalam rutin dan pembangunan mengalami besaran yang berfluktuasi. Pengeluaran pemerintah pada 12 Kabupaten/kota di Jawa Barat besarnya berbeda pada setiap tahunnya. Sejak tahun 2004 sesuai dengan kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja, belanja rutin dan pembangunan tercermin dalam biaya aparatur maupun belanja pelayanan. Pemerintah daerah memiliki pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan seperti hasil pajak, hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah dan pembiayaan daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah yang ada didalam struktur APBD pengeluaran rutin sama halnya dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembangunan sama halnya dengan belanja langsung. Pengeluaran pemerintah 12 kabupaten/kota di Jawa Barat selama periode 2004-2012 cenderung mengalami kenaikan. Realisasi tertinggi terjadi di daerah Kota Bandung sebesar Rp. 2.115.157.759. Kota Bandung salah satu daerah di Jawa Barat yang jaraknya berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai kewajiban untuk memungut pajak yang berasal dari pribadi maupun badan yang merupakan kegiatan dari sumber-sumber wilayahnya sendiri dan dari pendapatan pajak inilah kegiatan operasional dapat berjalan sehingga nantinya akan dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat meningkat dan dapat memicu meningkatnya pembangunan dan pertumbuhan di Kota Bandung. Pada tahun 2008 Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari sebelumnya. Pada tahun 2007 sebesar Rp. 2.036.918.260 mengalami penurunan sebesar 5,18%. Pada tahun 2008 Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.607.603.000. Penurunan terjadi kembali pada tahun 2009 namun tidak terlalu tinggi di Kabupaten Subang sebesar 1,24%. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 1.109.345.000 menjadi Rp. 1.095.615.420.

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Namun, dilihat setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 pengeluaran rutin lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa krisis belanja pemerintah daerah terlihat lebih ekspansif, tetapi peningkatan ini didominasi oleh belanja rutin yang digunakan sebagian besar untuk belanja konsumtif seperti pembayaran gaji yang disebabkan adanya pengalihan pegawai yang dari status pegawai negeri pusat diperbantukan maupun dipekerjakan menjadi pegawai negeri daerah yang penggajiannya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, pembayaran beban bunga hutang dan subsidi sehingga mengakibatkan penambahan pada sisi pengeluaran agregat relatif kecil apalagi jika kondisi ini tidak didukung oleh pembiayaan yang tepat maka akan memperbesar beban defisit anggaran.

Gambar 4.2
Rata-rata Pengeluaran Pemerintah 12 Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2004-2012



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) diolah

Daerah yang terendah realisasi pengeluaran pemerintah terdapat di daerah kabupaten purwakarta sebesar Rp. 712.469.835. Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2012 sebagian besar masih tergantung dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik berupa Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber pendapatan daerah yang ada baik dalam retribusi daerah maupun pajak daerah.

B. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dan diolah menggunakan program *Eviews 6.0*. *Eviews* digunakan untuk mengolah data statistika dan data ekonometrika, kelebihan dari program ini adalah kemampuannya dalam mengolah data panel menjadi lebih mudah, karena dapat diperlakukan sebagai data *cross section*, *time series*, maupun sebagai data panel.

Model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga model estimasi, yaitu *common effects*, *fix effects*, dan *random effects*. Untuk menentukan metode panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Uji Chow dan Uji Hausman merupakan pengujian yang dapat digunakan dalam menentukan apakah model panel data dapat diregresikan dengan metode *Pooled Least Square* (PLS), metode *Fixed Effects* (FE), atau metode *Random Effects* (RE). Untuk menentukan apakah model panel data diregresi dengan metode *Pooled Least Square* atau dengan metode *Fixed Effect*, maka dilakukan pengujian Chow. Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Pooled Least Square* yang digunakan, maka tidak perlu diuji kembali dengan pengujian Hausman. Namun apabila dari hasil uji tersebut ditentukan bahwa metode *Fixed Effects* yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan pengujian Hausman untuk lebih memilih antara metode *Fixed Effects*, atau metode *Random Effects* yang akan digunakan. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas dari *cross section* $F > 0,05$ maka H_0

diterima, artinya peneliti dapat menggunakan *model common effects* dan pengujian berhenti sampai pada uji Chow. Namun, apabila *cross section F* < 0.05 maka H_0 ditolak yang berarti perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman.

Tabel 4.8
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: MELISA
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	397.370653	(11,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	416.960676	11	0.0000

Pada tabel terlihat bahwa nilai probabilitas dari *cross section F* adalah $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak. Sehingga metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*. Oleh karena itu perlu dilakukan uji selanjutnya yakni uji Hausman, yaitu untuk menentukan metode mana yang paling tepat digunakan, apakah metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai *Chi Square* dengan nilai probabilitas uji Hausman < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Namun apabila nilai probabilitas uji Hausman > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *model random effects*.

Tabel 4.9
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: MELISA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.607697	2	0.0000

Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai *Chi Square* dengan nilai probabilitas uji Hausman < 0.05 maka dapat disimpulkan H_0 ditolak. Namun apabila nilai probabilitas uji Hausman > 0.05 maka H_0 diterima yang berarti model yang digunakan adalah *model random effects*. Berdasarkan Uji Hausman diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai probabilitas Hausman adalah sebesar $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa model yang digunakan ialah model *fixed effects*.

1. Persamaan Regresi

Pengujian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari Investasi (X1) dan Pengeluaran Pemerintah (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Analisis digunakan karena jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu untuk menganalisis pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebasnya. Berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan, diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Persamaan Regresi

Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/04/14 Time: 12:30
Sample: 2004 2012
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.70568	0.442752	49.02445	0.0000
INV?	0.013082	0.006569	1.991478	0.0493
GOV?	0.291565	0.017554	16.61003	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KABBOGOR--C	0.697712			
_KABSUKABUMI--C	-0.430088			
_KABBANDUNG--C	0.404703			
_KABCIREBON--C	-0.463170			
_KABSUBANG--C	-0.523685			
_KABPURWAKARTA--C	-0.448054			
_KABKARAWANG--C	0.342438			
_KABBEKASI--C	1.278107			
_KOTABOGOR--C	-0.892387			
_KOTABANDUNG--C	0.619653			
_KOTABEKASI--C	0.089607			
_KOTADEPOK--C	-0.674836			

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y = 21.70568 + 0.013082 \ln X_1 + 0.291565 \ln X_2 + \epsilon$$

Dalam pengujian persamaan regresi dapat diketahui daerah yang koefisiennya negatif dan positif. Daerah yang berkoefisien positif terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan daerah yang berkoefisien negatif terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengujian ketepatan model regresi

data panel dengan uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian signifikansi pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji t beserta interpretasi variabel yang signifikan memengaruhi variabel dependen. Setelah itu dilakukan pengujian *goodness of fit* terhadap model data panel melalui besaran nilai Koefisien Determinasi (*R-square adjusted*). Hasil dari ketiga tahapan ini ialah sebagai berikut:

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Dapat pula dilihat dari t hitung $> t$ tabel, dengan $\alpha=5\%$ dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ atau $108-2-1=105$ sehingga diperoleh t tabel sebesar 1.98282

Tabel 4.11
Uji t

Dependent Variable: PDRB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 06/04/14 Time: 12:30
Sample: 2004 2012
Included observations: 9
Cross-sections included: 12
Total pool (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.70568	0.442752	49.02445	0.0000
INV?	0.013082	0.006569	1.991478	0.0493
GOV?	0.291565	0.017554	16.61003	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KABBOGOR--C	0.697712			
_KABSUKABUMI--C	-0.430088			
_KABBANDUNG--C	0.404703			
_KABCIREBON--C	-0.463170			
_KABSUBANG--C	-0.523685			
_KABPURWAKARTA--C	-0.448054			
_KABKARAWANG--C	0.342438			
_KABBEKASI--C	1.278107			
_KOTABOGOR--C	-0.892387			
_KOTABANDUNG--C	0.619653			
_KOTABEKASI--C	0.089607			
_KOTADEPOK--C	-0.674836			

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel Investasi memiliki probabilitas sebesar 0,0259 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0493 < 0,05$) yang artinya H_0 ditolak serta nilai t hitung $>$ t tabel ($1.991478 > 1.98282$). Hal ini mengindikasikan bahwa Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel Investasi adalah berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi karena nilai konstanta dari variabel investasi adalah bertanda positif, yaitu sebesar 0.013082.

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, variabel GOV memiliki probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($0,0000 > 0,05$) yang artinya H_0 ditolak serta nilai t hitung $>$ t tabel ($16.61003 > 1.98282$). Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial. Dalam hal ini, pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah adalah berpengaruh positif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi karena nilai konstanta dari variabel GOV adalah bertanda positif yaitu sebesar 0.291565 .

b. Uji F

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%.

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Serta dengan melihat F hitung $>$ F tabel yakni df_1 (jumlah variabel-1) dan df_2 ($n-k-1$) dimana n ialah jumlah observasi sehingga

didapat F tabel sebesar 3.08. Adapun hasil uji F disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Uji F

R-squared	0.882362	Mean dependent var	30.15115
Adjusted R-squared	0.853706	S.D. dependent var	0.762984
S.E. of regression	0.071143	Akaike info criterion	-2.327825
Sum squared resid	0.475766	Schwarz criterion	-1.980141
Log likelihood	139.7025	Hannan-Quinn criter.	-2.186852
F-statistic	939.4546	Durbin-Watson stat	1.311411
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari hasil uji F (simultan) pada tabel di atas, dapat diketahui nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0,000000 dimana nilai probabilitas ini berada dibawah nilai signifikansi sebesar 5% ($0,000000 < 0,05$) serta $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ yakni $939.4546 > 3.08$. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji F (simultan) menolak H_0 , artinya bahwa variabel Investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Analisis Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisien determinasi ini mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi.

Tabel 4.13
Uji R²

R-squared	0.882362	Mean dependent var	30.15115
Adjusted R-squared	0.853706	S.D. dependent var	0.762984
S.E. of regression	0.071143	Akaike info criterion	-2.327825
Sum squared resid	0.475766	Schwarz criterion	-1.980141
Log likelihood	139.7025	Hannan-Quinn criter.	-2.186852
F-statistic	939.4546	Durbin-Watson stat	1.311411
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas diperoleh koefisien determinasi atau *Adjusted R Square* adalah 0,853706 artinya 85,37 % variabel pertumbuhan ekonomi variasinya dapat dijelaskan oleh seluruh variabel investasi dan pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 14,63% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian.

4. Uji Asumsi Klasik

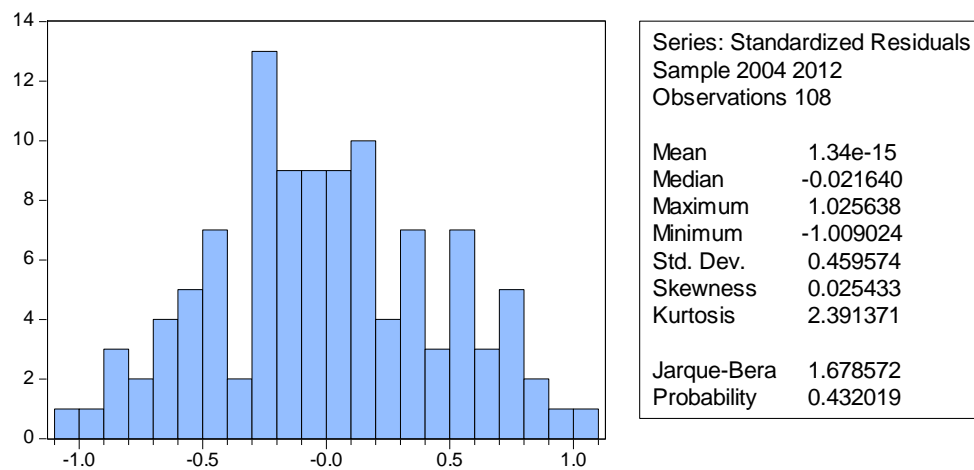
a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam model regresi, pengujian uji normalitas dilakukan terhadap data residual. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Berra*. Dimana hipotesis pada uji *Jarque-Berra* adalah sebagai berikut:

- Ho : Residual berdistribusi normal
- Ha : Residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari $\alpha=5\%$, maka menerima H_0 yang artinya residual data berdistribusi normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Grafik distribusi normal ini dapat dilihat dari bentuk grafik yang disistribusikan secara simetris. Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat bahwa residual data berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistik uji *Jarque-Berra* untuk nilai residual yaitu 0,432019 sehingga H_0 diterima. Artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

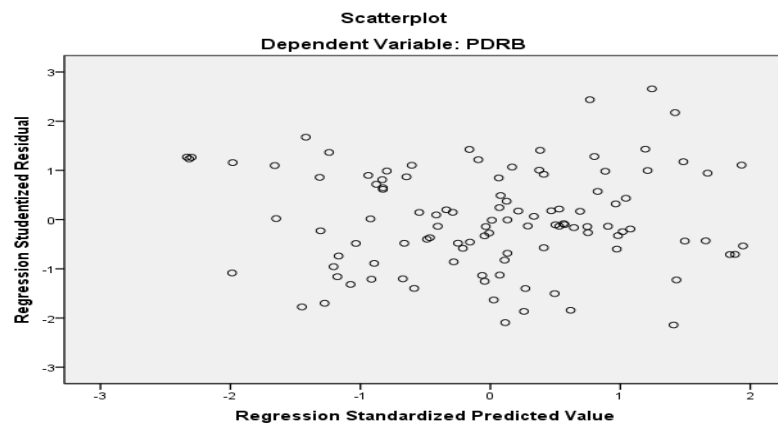
b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas.

Dasar analisis:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastis.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastis.

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil dari *scatter plot* tampak bahwa *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED yang terbentuk menyebar tidak memiliki pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta di kanan dan di kiri pada sumbu X. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi sudah tidak terjadi hubungan antara variabel bebas dengan nilai residual. Dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas model regresi terpenuhi.

C. Pembahasan

Berdasarkan tahapan dan perhitungan yang telah dilakukan pada periode waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 terhadap 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yaitu antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Puwarkarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung . Dimana bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, peneliti dalam hal ini menggunakan model-model estimasi, dimana berdasarkan hasil penelitian model terbaik yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effects*. Penelitian ini mempunyai persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 21.70568 + 0.013082 \text{ LnX}_1 + 0.291565 \text{ LnX}_2 + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 21.70568 menunjukkan bahwa jika investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi akan mengalami perubahan positif sebesar 21.70568. Dalam pengujian persamaan regresi dapat diketahui daerah yang koefisien negatif dan positif. Daerah yang berkoefisien positif terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Bekasi dan daerah yang berkoefisien negatif terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor dan Kota Depok.

1. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada investasi terlihat bahwa $t_{hitung} (1,991478) > t_{tabel} (1,98282)$ dengan signifikansi $(0,0493 < 0,05)$ lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% hal ini menunjukkan pengaruh positif antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, ini berarti sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana kondisi yang terjadi ketika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat dan sebaliknya ketika investasi menurun, pertumbuhan ekonomi menurun. Terlihat pada data investasi selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2012.

Pada data yang diperoleh menunjukkan bahwa investasi tertinggi diduduki oleh Kabupaten Bekasi jika dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, karena Kabupaten Bekasi menjadil salah satu titik yang dituju para investor untuk berinvestasi. Salah satu penyebab meningkatnya investasi di Kabupaten Bekasi rendahnya harga lahan yang ditawarkan sehingga meningkatkan minat investor untuk menginvestasikan dananya di Kabupaten Bekasi.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh sayekti suindyah dalam jurnal Ekuitas Akreditasi No.110/DIKTI/Kep/2009, yang menyatakan bahwa variabel investasi secara uji t statistik memiliki pengaruh yang positif dengan nilai signifikan $0,040 < 0,05$ dan Engla Desnim Silvia, Yunia Wardi dan Hasdi Aimon dalam Jurnal Kajian Ekonomi Vol. 1, No. 02 yang menyatakan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan di Indonesia. Artinya bahwa kenaikan investasi akan memicu terhadap pertumbuhan ekonomi karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadi kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada variabel Pengeluaran Pemerintah terlihat bahwa t_{hitung} ($16,61003 > t_{tabel}$ 1,98282) dengan signifikansi ($0,0000 < 0,05$) lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% hal ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa meningkatnya pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini

selaras dengan penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sulistiyono dalam jurnal lipi Vol 12, Nomor 3 September 2008. Hasil empiris dari penelitian mengatakan dengan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan akan menentukan besarnya permintaan agregat yang secara makro akan dapat dipengaruhi besarnya PDRB. Hal ini merupakan peranan pemerintah dalam menentukan proses pertumbuhan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan nasional artinya dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Secara simultan dengan pengujian F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} , diperoleh nilai $F_{hitung} = 939.4546$ sedangkan $F_{tabel} = 3,08$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dengan tingkat kepercayaan 95% investasi dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi secara bersama – sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara koefisien determinasi (R^2) juga menunjukkan angka sebesar 0.853706 yang berarti variasi dari investasi (X_1) dan pengeluaran pemerintah (X_2) secara bersama-sama menjelaskan

pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 85,37 % dan sisanya (14,63%) dijelaskan oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang diungkapkan oleh Keynes dengan model makroekonomi dimana $Y = C + I + G + X - M$. Terjadinya kenaikan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto yang meningkat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Begitu sebaliknya, terjadi penurunan pada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta net ekspor akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa akan menyebabkan penurunan terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto yang menurun akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas dapat diketahui bahwa investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan uji *Jarque-Berra* memiliki distribusi normal dengan probability $0,432019 > 0,05$. Pada uji heteroskedastisitas dengan hasil dari *scatter plot* tampak bahwa *scatter plot* yang terbentuk menyebar tidak memiliki pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta di kanan dan di kiri pada sumbu X yang artinya asumsi non heteroskedastisitas model regresi terpenuhi.

D. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya sampai pada tingkat kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan karena masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) begitu kompleks, sehingga tidak hanya dipengaruhi oleh nilai investasi dan pengeluaran pemerintah saja. Tetapi juga banyak faktor lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi yang tidak disertakan dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh peneliti, sehingga mempengaruhi ketepatan peneliti dalam mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Investasi secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika investasi naik akan memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Naiknya investasi maka sumber pembiayaan akan meningkat.
2. Pengeluaran pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan.
3. Investasi dan pengeluaran pemerintah secara normal, simultan berpengaruh pertumbuhan ekonomi.
4. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 85,37%. Artinya masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 14,63%.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi negara maupun daerah diperlukan adanya investasi yang didapat selain melalui usaha peningkatan sumber penanaman modal dalam negeri maupun asing. Peningkatan investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi serta kontribusi masyarakat. Kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi yang dampaknya akan meningkatnya pendapatan nasional dikarenakan jumlah output barang dan jasa. Dengan adanya investasi akan meningkatkan stok modal yang memungkinkan terjadinya peningkatan output.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini artinya pengeluaran pemerintah yang telah dianggarkan melalui belanja langsung atau belanja pembangunan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pengeluaran yang dialokasikan untuk barang-barang publik harus dapat menunjukkan hasil yang nyata agar salah satu faktor penghambat investasi seperti infratraktur yang buruk dapat teratasi dan membuat iklim investasi lebih kondusif. Jadi, pengeluaran pemerintah tersebut dapat bersifat produktif, investasi pemerintah yang merupakan bagian dari pengeluaran

pemerintah tersebut juga dapat bersifat komplementer terhadap investasi swasta. Apabila keduanya dapat terwujud maka anggaran pun akan tetap stabil.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan serta implikasi di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yakni:

1. Dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, hendaknya pemerintah daerah meningkatkan investasi baik asing maupun dalam negeri dan pengeluaran pemerintah juga harus ditingkatkan baik belanja rutin maupun belanja pembangunan.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah peranan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sesuai otonomi daerah harus ditingkatkan. Penanaman Modal Dalam Negeri harus ditingkatkan karena dengan ditingkatkannya modal dalam negeri pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan meningkatkan dan seimbang dengan penanaman modal asing. Hendaknya pemerintah daerah perlu mempermudah investor dalam negeri untuk berinvestasi di daerah dan agar meningkatnya modal negeri.
3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hendaknya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun pembangunan. Belanja rutin maupun belanja pembangunan harus

seimbang. Hendaknya belanja pembangunan di Jawa Barat harus ditingkatkan agar keberhasilan pembangunan ekonomi dicapai. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah maka akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi, namun ini bukan berarti pemerintah harus mengeluarkan pengeluaran dengan besar-besaran tanpa arah yang jelas, tetapi harus diimbangi dengan keberhasilan pembangunan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, **Manajemen Keuangan Daerah**, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2001)
- Arsyad Lincolin, **Ekonomi Pembangunan**, Edisi Ketiga, STIE YKPN 2006
- Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia
- Bambang Sulistiyono, **Pengaruh Pertumbuhan Angkatan Kerja Terdidik Pertumbuhan Tabungan Masyarakat, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah pada Pertumbuhan Ekonomi Regional Periode 1993.1-2006.4**, *Dalam Jurnal Paradigma, September 2008, Vol.12, No. 3*
- Bidang neraca wilayah dan Analisis Statistik, **Kajian Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan**, (Jakarta : BPS atau Badan Pusat Statistik , 2008
- Boediono, **Seri Pengantar Ekonomika Makro**, edisi kedua, (Yogyakarta: BPFE UGM,1999)
- _____ .**perekonomian indonesia**, YKPN, 2000
- Damodar N. Gujarati, **Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1**, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Dumairy. **Perekonomian Indonesia**. (Jakarta: Erlangga, 1999)
- Duwi Priyatno, **Buku Saku SPSS Analisis Statistik Data**(Jakarta: MediaKom, 2011)
- Graham Bannock,R.E Baxter dan Evan Davus, **A Dictionary of Economics**, (Inggris: Penguin Books.Ltd, 2004)
- Mangkoesoebroto Guritno , **Ekonomi Publik**, BPFE Yogyakarta 1999
- M. Iqbal Hasan, **Pokok-Pokok Materi Statistik 2** (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008)
- Mankiw, N. Gregory. **Pengantar Ilmu Ekonom**. jilid I. Jakarta: Erlangga, 2004
- Michael Todaro, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan,2004

_____. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga Edisi Keenam, 1998

M. Suparmoko, **Pengantar Ekonomika Makro**, (Yogyakarta: BPFE), 1999

Nanga Muana, **Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,) 2001

Paul A. Samuelson dan William D Nordhaus, **Makro Ekonomi, Edisi Keempatbelas**, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, **Teori Ekonomi Makro**, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 2005

Rosyidi Suherman, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2000)

Sugiono. **Metode Penelitian Bisnis**. Jakarta: Alfabeta, 2004

Sukirno Sadono, **Makroekonomi Teori Pengantar**, Edisi 1. Jakarta: Rajawali pers 2010

_____. **Makroekonomi: Teori Pengantar**, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

Sony Yuwono, et.al, **Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Perencanaan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)**, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005)

Tarigan Robinson, **Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi**, (Jakarta: Bumi Aksara) 2006

Wijaya, Faried, **Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro**, (Yogyakarta: BPFE), 2000

Internet:

Sabar, **Melambat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat**, 2013
<http://www.tubasmedia.com/berita/melambat-pertumbuhan-ekonomi-jawa-barat/> (diakses 15 April 2014)

Arif Budiman, **Pertumbuhan ekspor Jawa Barat lemah**,
<http://ekbis.sindonews.com/read/2012/08/06/34/663411/pertumbuhan-ekspor-jabar-lemah> (diakses 15 April 2014)

Gatti,, **Pertumbuhan Ekonomi Belum Bersifat Inklusif**,
<http://beritamoneter.com/pertumbuhan-ekonomi-belum-bersifat-inklusif/>
(diakses 15 April2014)

Lampiran 1

**DATA REALISASI INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
PDRB KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2004-2012**

Provinsi	Tahun	PDRB	INV	GE
Kab. Bogor	2004	23.671.430.000.000	1.383.503.000.000	937.018.985.000
Kab. Bogor	2005	25.056.370.000.000	794.049.000.000	1.039.361.810.000
Kab. Bogor	2006	26.546.190.000.000	2.713.587.000.000	1.374.744.400.000
Kab. Bogor	2007	28.151.620.000.000	1.493.999.000.000	1.692.601.210.000
Kab. Bogor	2008	29.722.000.000.000	1.689.554.000.000	1.978.664.000.000
Kab. Bogor	2009	30.952.000.000.000	3.568.686.000.000	2.380.595.223.000
Kab. Bogor	2010	32.526.000.000.000	3.147.648.000.000	2.516.354.090.000
Kab. Bogor	2011	34.465.000.000.000	4.685.205.000.000	3.198.116.870.000
Kab. Bogor	2012	36.531.000.000.000	4.093.953.000.000	3.363.413.760.000
Kab Sukabumi	2004	6.828.320.000.000	305.295.000.000	532.693.960.000
Kab Sukabumi	2005	7.125.600.000.000	125.340.000.000	612.640.076.000
Kab Sukabumi	2006	7.404.870.000.000	158.500.000.000	932.880.101.000
Kab Sukabumi	2007	7.714.820.000.000	119.780.000.000	1.071.153.620.000
Kab Sukabumi	2008	8.015.000.000.000	898.743.000.000	1.313.290.679.000
Kab Sukabumi	2009	8.308.000.000.000	545.590.000.000	1.320.179.699.000
Kab Sukabumi	2010	8.642.000.000.000	203.280.000.000	1.549.051.028.000
Kab Sukabumi	2011	8.993.000.000.000	874.168.000.000	1.764.268.785.000
Kab Sukabumi	2012	9.383.000.000.000	449.483.000.000	1.874.616.204.000
Kab Bandung	2004	21.574.730.000.000	140.549.000.000	1.187.399.259.000
Kab Bandung	2005	22.772.640.000.000	1.115.461.000.000	1.135.532.110.000
Kab Bandung	2006	17.640.170.000.000	52.821.000.000	1.618.704.800.000
Kab Bandung	2007	18.683.930.000.000	363.549.000.000	1.962.177.060.000
Kab Bandung	2008	19.674.000.000.000	407.075.000.000	1.553.765.000.000
Kab Bandung	2009	20.528.000.000.000	310.329.000.000	1.704.152.000.000
Kab Bandung	2010	21.735.000.000.000	637.542.000.000	2.093.853.549.000
Kab Bandung	2011	23.026.000.000.000	892.324.000.000	2.350.772.521.000
Kab Bandung	2012	24.443.000.000.000	411.266.000.000	2.645.284.571.000
Kab Cirebon	2004	6.038.360.000.000	387.702.000.000	564.528.281.000
Kab Cirebon	2005	6.343.780.000.000	85.140.000.000	616.243.940.000
Kab Cirebon	2006	6.670.000.000.000	74.200.000.000	865.932.885.000
Kab Cirebon	2007	7.028.260.000.000	532.730.000.000	1.016.241.510.000
Kab Cirebon	2008	7.372.000.000.000	2.000.000.000	1.131.773.234.000
Kab Cirebon	2009	7.746.000.000.000	631.685.000.000	1.190.594.398.000

Kab Cirebon	2010	8.130.000.000.000	3.203.760.000.000	1.356.526.480.000
Kab Cirebon	2011	8.539.000.000.000	4.582.364.000.000	1.750.302.860.000
Kab Cirebon	2012	8.950.000.000.000	6.671.172.000.000	1.995.468.757.000
Kab Subang	2004	5.633.680.000.000	178.060.000.000	497.444.132.000
Kab Subang	2005	6.026.460.000.000	160.800.000.000	501.913.220.000
Kab Subang	2006	6.252.500.000.000	42.200.000.000	681.954.890.000
Kab Subang	2007	6.473.000.000.000	149.954.000.000	946.975.275.000
Kab Subang	2008	6.754.000.000.000	36.989.000.000	1.059.345.000.000
Kab Subang	2009	7.067.000.000.000	310.442.000.000	1.045.615.420.000
Kab Subang	2010	7.373.000.000.000	541.514.000.000	1.110.508.203.000
Kab Subang	2011	7.701.000.000.000	257.794.000.000	1.310.177.222.000
Kab Subang	2012	8.049.000.000.000	341.580.000.000	1.416.947.256.000
Kab Purwakarta	2004	5.547.110.000.000	1.379.756.000.000	341.700.524.000
Kab Purwakarta	2005	5.741.810.000.000	84.818.000.000	142.428.240.000
Kab Purwakarta	2006	5.964.000.000.000	634.996.000.000	482.552.812.000
Kab Purwakarta	2007	6.204.000.000.000	510.840.000.000	580.627.531.000
Kab Purwakarta	2008	6.506.000.000.000	333.550.000.000	641.200.890.000
Kab Purwakarta	2009	6.850.000.000.000	4.949.811.000.000	773.962.503.000
Kab Purwakarta	2010	7.245.000.000.000	1.256.068.000.000	979.822.814.000
Kab Purwakarta	2011	7.708.000.000.000	4.182.440.000.000	1.072.194.035.000
Kab Purwakarta	2012	8.195.000.000.000	4.275.031.000.000	1.123.606.183.000
Kab Karawang	2004	13.423.740.000.000	21.65.350.000.000	615.131.268.000
Kab Karawang	2005	14.479.920.000.000	4.385.334.000.000	641.093.729.000
Kab Karawang	2006	15.568.180.000.000	81.30.224.000.000	947.900.610.000
Kab Karawang	2007	16.559.000.000.000	12.693.236.000.000	1.049.282.344.000
Kab Karawang	2008	18.354.000.000.000	4.939.981.000.000	1.245.559.982.000
Kab Karawang	2009	19.712.000.000.000	3.370.996.000.000	1.356.593.574.000
Kab Karawang	2010	21.615.000.000.000	5.298.449.000.000	1.478.725.477.000
Kab Karawang	2011	23.212.000.000.000	8.784.627.000.000	1.977.728.204.000
Kab Karawang	2012	25.339.000.000.000	9.397.608.000.000	2.363.601.553.000
Kab Bekasi	2004	38.976.640.000.000	6.053.558.000.000	683.368.316.000
Kab Bekasi	2005	41.319.270.000.000	21.050.071.000.000	714.864.940.000
Kab Bekasi	2006	43.793.370.000.000	9.610.091.000.000	1.060.180.100.000
Kab Bekasi	2007	46.480.290.000.000	7.692.119.000.000	1.318.882.859.000
Kab Bekasi	2008	49.302.000.000.000	11.302.357.000.000	1.516.380.376.000
Kab Bekasi	2009	51.790.000.000.000	8.202.597.000.000	2.038.392.181.000
Kab Bekasi	2010	54.998.900.000.000	8.019.492.000.000	1.782.205.526.000
Kab Bekasi	2011	58.433.000.000.000	16.165.580.000.000	1.926.031.272.000
Kab Bekasi	2012	62.068.000.000.000	20.302.782.000.000	2.420.015.375.000
Kota Bogor	2004	3.361.440.000.000	3.924.000.000	341.778.053.000

Kota Bogor	2005	3.567.230.000.000	12.440.000.000	385.449.762.000
Kota Bogor	2006	3.782.270.000.000	5.750.000.000	545.381.081.000
Kota Bogor	2007	4.012.740.000.000	8.250.000.000	632.442.953.000
Kota Bogor	2008	4.253.000.000.000	204.210.000.000	736.632.000.000
Kota Bogor	2009	4.509.000.000.000	26.230.000.000	818.430.032.000
Kota Bogor	2010	4.785.000.000.000	69.640.000.000	960.407.758.000
Kota Bogor	2011	5.081.000.000.000	968.304.000.000	1.036.822.288.000
Kota Bogor	2012	5.394.000.000.000	16.290.000.000	1.279.226.445.000
Kota Bandung	2004	19.874.810.000.000	2.055.603.000.000	986.243.885.000
Kota Bandung	2005	21.370.700.000.000	350.112.000.000	1.096.592.281.000
Kota Bandung	2006	23.043.100.000.000	190.263.000.000	1.301.547.185.000
Kota Bandung	2007	24.941.520.000.000	378.060.000.000	1.629.508.553.000
Kota Bandung	2008	26.963.000.000.000	2.841.131.000.000	2.145.988.347.000
Kota Bandung	2009	29.228.000.000.000	404.707.000.000	2.453.725.000.000
Kota Bandung	2010	31.697.000.000.000	7.876.548.000.000	2.461.711.591.000
Kota Bandung	2011	34.464.000.000.000	2.206.704.000.000	2.858.379.462.000
Kota Bandung	2012	37.558.000.000.000	3.621.887.000.000	3.634.707.922.000
Kota Bekasi	2004	11.112.520.000.000	207.253.000.000	569.524.662.000
Kota Bekasi	2005	11.739.950.000.000	624.643.000.000	731.022.520.000
Kota Bekasi	2006	12.453.010.000.000	274.847.000.000	881.862.420.000
Kota Bekasi	2007	13.255.150.000.000	206.280.000.000	1.112.557.800.000
Kota Bekasi	2008	14.042.000.000.000	2.099.943.000.000	1.272.092.000.000
Kota Bekasi	2009	14.623.000.000.000	619.625.000.000	1.517.825.430.000
Kota Bekasi	2010	15.476.000.000.000	1.126.401.000.000	1.748.528.532.000
Kota Bekasi	2011	16.572.000.000.000	1.893.055.000.000	1.906.125.173.000
Kota Bekasi	2012	17.706.000.000.000	1.019.046.000.000	2.390.864.003.000
Kota Depok	2004	4.440.880.000.000	428.480.000.000	369.955.270.000
Kota Depok	2005	4.750.030.000.000	88.173.000.000	467.451.907.000
Kota Depok	2006	5.066.130.000.000	98.230.000.000	581.345.467.000
Kota Depok	2007	5.423.000.000.000	220.567.000.000	868.425.905.000
Kota Depok	2008	5.771.000.000.000	2.627.960.000.000	889.719.496.000
Kota Depok	2009	6.130.000.000.000	385.620.000.000	959.839.912.000
Kota Depok	2010	6.519.000.000.000	816.022.000.000	1.105.462.686.000
Kota Depok	2011	6.949.000.000.000	3.097.672.000.000	1.373.748.108.000
Kota Depok	2012	7.446.000.000.000	203.830.000.000	1.551.869.450.000

Sumber: BPS Jawa Barat dan BKPM

Lampiran 2

**DATA REALISASI INVESTASI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
PDRB KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2004-2012 (Ln)**

Provinsi	Tahun	LN PDRB	LN INV	LN GE
Kab. Bogor	2004	30.79528995	27.9556398	27.56596938
Kab. Bogor	2005	30.8521492	27.40041101	27.669628
Kab. Bogor	2006	30.90990735	27.62929249	27.94928894
Kab. Bogor	2007	30.96862602	28.03247753	28.15728764
Kab. Bogor	2008	31.02290863	28.1554857	28.31344299
Kab. Bogor	2009	31.06345873	28.90321858	28.49837167
Kab. Bogor	2010	31.11306089	28.77767662	28.55383218
Kab. Bogor	2011	31.17096543	29.17543079	28.79358327
Kab. Bogor	2012	31.22918233	29.04053212	28.84397757
Kab Sukabumi	2004	29.55209979	26.44454436	27.00121291
Kab Sukabumi	2005	29.59471505	25.55429588	27.14104345
Kab Sukabumi	2006	29.63315901	25.78902043	27.56154252
Kab Sukabumi	2007	29.67416427	25.50892256	27.69975733
Kab Sukabumi	2008	29.7123359	27.52426296	27.90355707
Kab Sukabumi	2009	29.74824002	26.02513361	27.90878898
Kab Sukabumi	2010	29.78765515	26.03785018	28.06866362
Kab Sukabumi	2011	29.82746761	27.49653841	28.19875743
Kab Sukabumi	2012	29.86992066	26.83136387	28.25942506
Kab Bandung	2004	30.70254384	25.66882202	27.80278653
Kab Bandung	2005	30.75658093	27.74028889	27.75812248
Kab Bandung	2006	30.5011998	24.69017468	28.11264744
Kab Bandung	2007	30.55868491	26.61917993	28.30507572
Kab Bandung	2008	30.61031908	26.73226328	28.07170213
Kab Bandung	2009	30.65281092	26.46089886	28.16408874
Kab Bandung	2010	30.70994498	27.18088599	28.37002729
Kab Bandung	2011	30.76764513	27.51709513	28.48576512
Kab Bandung	2012	30.82736499	26.74250604	28.60379976
Kab Cirebon	2004	29.42915357	26.68350284	27.05925632
Kab Cirebon	2005	29.47849592	25.1675628	27.14690873
Kab Cirebon	2006	29.52864098	22.72744489	27.48707324
Kab Cirebon	2007	29.58096028	27.00128057	27.64713214
Kab Cirebon	2008	29.62871016	21.41641302	27.75480675
Kab Cirebon	2009	29.6781977	27.17165669	27.80547379
Kab Cirebon	2010	29.72658204	28.79534624	27.93594849

Kab Cirebon	2011	29.77566502	27.15323614	28.19080995
Kab Cirebon	2012	29.82267465	27.52881667	27.3219001
Kab Subang	2004	29.35978399	25.90538641	26.93274909
Kab Subang	2005	29.42718089	25.80342719	26.94169307
Kab Subang	2006	29.4640025	24.46568606	27.24822935
Kab Subang	2007	29.4986608	25.73359442	27.57653882
Kab Subang	2008	29.54115604	24.33388641	27.68867191
Kab Subang	2009	29.58645718	26.46126293	27.67562675
Kab Subang	2010	29.62884579	27.01763476	27.73583887
Kab Subang	2011	29.67237131	26.27542665	27.90118353
Kab Subang	2012	29.71656898	26.55684775	27.97952585
Kab Purwakarta	2004	29.34429819	27.95292779	26.55720053
Kab Purwakarta	2005	29.37879561	25.16377362	25.68210413
Kab Purwakarta	2006	29.41676251	27.17688454	26.90235621
Kab Purwakarta	2007	29.45621536	26.95932227	27.08737531
Kab Purwakarta	2008	29.50374594	26.53305862	27.18660865
Kab Purwakarta	2009	29.55526977	29.23037051	27.37478926
Kab Purwakarta	2010	29.61133269	27.85900732	27.61063759
Kab Purwakarta	2011	29.67327987	29.06191592	27.70072816
Kab Purwakarta	2012	29.73454533	29.08381247	27.74756444
Kab Karawang	2004	30.2280459	28.40360313	27.14510153
Kab Karawang	2005	30.30378398	29.10928691	27.18644151
Kab Karawang	2006	30.3762502	29.72660959	27.57751549
Kab Karawang	2007	30.43795088	30.17209037	27.67912756
Kab Karawang	2008	30.54086865	29.2283826	27.85060633
Kab Karawang	2009	30.6122487	28.84622937	27.93599795
Kab Karawang	2010	30.70440863	29.29843525	28.02220167
Kab Karawang	2011	30.7756905	29.80402438	28.31296993
Kab Karawang	2012	30.86336583	29.8714763	28.49120765
Kab Bekasi	2004	31.29398361	29.43166731	27.25029981
Kab Bekasi	2005	31.35235009	30.67792505	27.29535947
Kab Bekasi	2006	31.41050355	29.89383481	27.68945992
Kab Bekasi	2007	31.47004947	29.67121741	27.90780618
Kab Bekasi	2008	31.52898576	30.0560324	28.04734728
Kab Bekasi	2009	31.5782182	29.73547193	28.34318247
Kab Bekasi	2010	31.6383343	29.71289619	28.20887277
Kab Bekasi	2011	31.69890191	30.41390541	28.28648267
Kab Bekasi	2012	31.75925167	30.64177904	28.51479501
Kota Bogor	2004	28.84339057	24.39296247	26.5574274
Kota Bogor	2005	28.9028105	23.24418292	26.6776767

Kota Bogor	2006	28.96134547	22.47246569	27.02475062
Kota Bogor	2007	29.02049542	22.83347904	27.17285586
Kota Bogor	2008	29.07864573	26.04241471	27.32535428
Kota Bogor	2009	29.13709652	23.99016963	27.43065375
Kota Bogor	2010	29.19650714	24.96660495	27.59062378
Kota Bogor	2011	29.25652921	27.59881192	27.66718166
Kota Bogor	2012	29.31630834	23.51381726	27.87727667
Kota Bandung	2004	30.62047422	28.35159035	27.61716951
Kota Bandung	2005	30.69304194	26.58151894	27.72322856
Kota Bandung	2006	30.76838749	25.97167316	27.89457482
Kota Bandung	2007	30.847555	26.65831875	28.11929958
Kota Bandung	2008	30.92548667	28.67522333	28.39462133
Kota Bandung	2009	31.00614827	26.72642919	28.52862839
Kota Bandung	2010	31.08724316	29.69491085	28.53187799
Kota Bandung	2011	31.17093642	28.42252112	28.68127596
Kota Bandung	2012	31.25690752	28.91801628	28.92154987
Kota Bekasi	2004	30.03909352	26.05720611	27.06806792
Kota Bekasi	2005	30.09401867	27.16044612	27.3177101
Kota Bekasi	2006	30.15298348	26.33948042	27.50530189
Kota Bekasi	2007	30.21540727	26.05250031	27.7376828
Kota Bekasi	2008	30.27307395	28.37293132	27.87168391
Kota Bekasi	2009	30.31361675	27.15238029	28.04829979
Kota Bekasi	2010	30.37031155	27.75004871	28.18979571
Kota Bekasi	2011	30.43873564	28.26921304	28.27609359
Kota Bekasi	2012	30.50492468	27.64988801	28.50267592
Kota Depok	2004	29.12187367	26.7835099	26.63664794
Kota Depok	2005	29.18917205	25.20256663	26.87056231
Kota Depok	2006	29.25359833	25.3105775	27.08861102
Kota Depok	2007	29.32167028	26.11946734	27.48994811
Kota Depok	2008	29.38386649	28.597229	27.51417208
Kota Depok	2009	29.44421587	26.67811827	27.59003235
Kota Depok	2010	29.50574211	27.42770715	27.73128508
Kota Depok	2011	29.56961888	28.76167198	27.94856397
Kota Depok	2012	29.63869809	26.04055215	28.07048142

LAMPIRAN 3

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
 Pool: MELISA
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	397.370653	(11,94)	0.0000
Cross-section Chi-square	416.960676	11	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
 Dependent Variable: PDRB?
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/04/14 Time: 12:32
 Sample: 2004 2012
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 12
 Total pool (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.546508	2.217591	3.403021	0.0009
INV?	0.190941	0.026020	7.338163	0.0000
GOV?	0.627595	0.087447	7.176838	0.0000
R-squared	0.637189	Mean dependent var		30.15115
Adjusted R-squared	0.630279	S.D. dependent var		0.762984
S.E. of regression	0.463930	Akaike info criterion		1.329218
Sum squared resid	22.59925	Schwarz criterion		1.403722
Log likelihood	-68.77779	Hannan-Quinn criter.		1.359427
F-statistic	92.20360	Durbin-Watson stat		0.582951
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN 4

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: MELISA

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	89.607697	2	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
INV?	0.013082	0.019092	0.000001	0.0000
GOV?	0.291565	0.296382	0.000003	0.0026

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PDRB?

Method: Panel Least Squares

Date: 06/04/14 Time: 12:33

Sample: 2004 2012

Included observations: 9

Cross-sections included: 12

Total pool (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.70568	0.442752	49.02445	0.0000
INV?	0.013082	0.006569	1.991478	0.0493
GOV?	0.291565	0.017554	16.61003	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.882362	Mean dependent var	30.15115
Adjusted R-squared	0.871306	S.D. dependent var	0.762984
S.E. of regression	0.071143	Akaike info criterion	-2.327825
Sum squared resid	0.475766	Schwarz criterion	-1.980141
Log likelihood	139.7025	Hannan-Quinn criter.	-2.186852
F-statistic	939.4546	Durbin-Watson stat	1.311411
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN 5

PERSAMAAN REGRESI

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/04/14 Time: 12:30
 Sample: 2004 2012
 Included observations: 9
 Cross-sections included: 12
 Total pool (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.70568	0.442752	49.02445	0.0000
INV?	0.013082	0.006569	1.991478	0.0493
GOV?	0.291565	0.017554	16.61003	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KABBOGOR--C	0.697712			
_KABSUKABUMI--C	-0.430088			
_KABBANDUNG--C	0.404703			
_KABCIREBON--C	-0.463170			
_KASUBANG--C	-0.523685			
_KABPURWAKARTA--C	-0.448054			
_KABKARAWANG--C	0.342438			
_KABBEKASI--C	1.278107			
_KOTABOGOR--C	-0.892387			
_KOTABANDUNG--C	0.619653			
_KOTABEKASI--C	0.089607			
_KOTADEPOK--C	-0.674836			

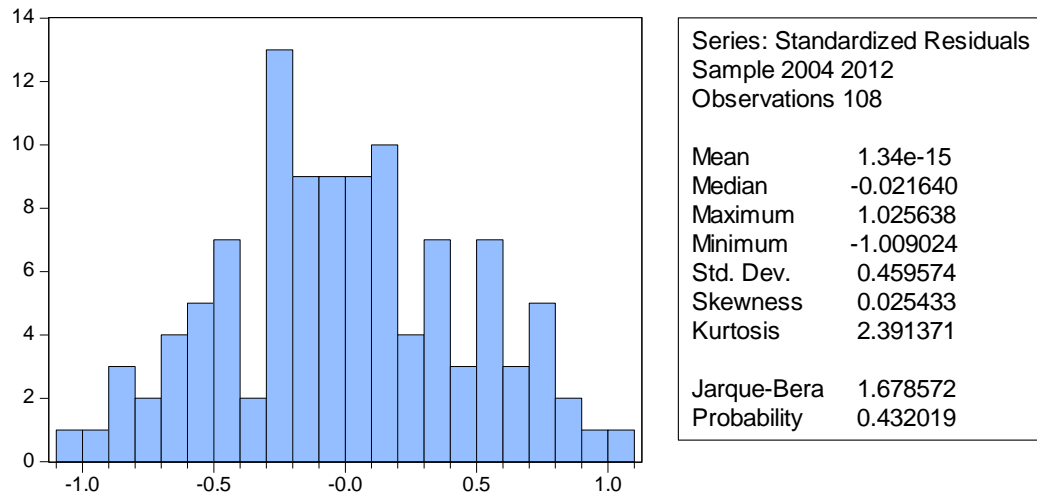
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.882362	Mean dependent var	30.15115
Adjusted R-squared	0.853706	S.D. dependent var	0.762984
S.E. of regression	0.071143	Akaike info criterion	-2.327825
Sum squared resid	0.475766	Schwarz criterion	-1.980141
Log likelihood	139.7025	Hannan-Quinn criter.	-2.186852
F-statistic	939.4546	Durbin-Watson stat	1.311411
Prob(F-statistic)	0.000000		

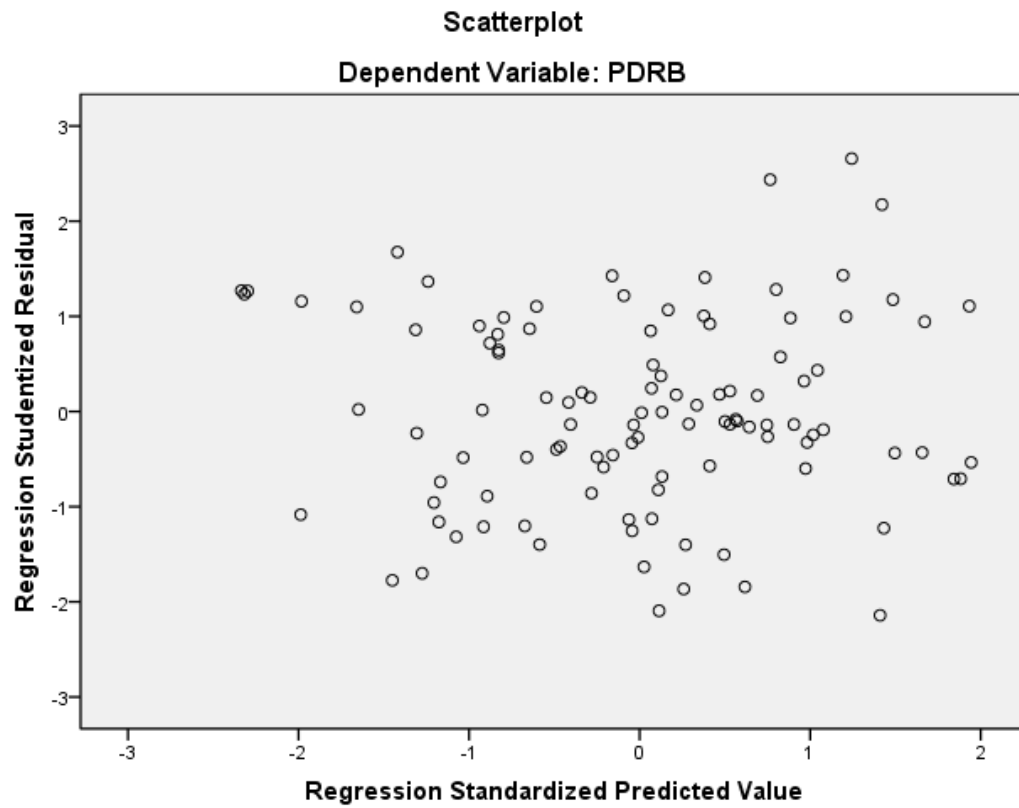
LAMPIRAN 6

UJI NORMALITAS



Lampiran 7

UJI HETEROSKEDASTISITAS



Lampiran 8

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

k=1 n	k=2		k=3		k=4		k=5			
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dU	
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813
103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683	1.6063	1.7874
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690	1.6084	1.7878
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696	1.6105	1.7883
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702	1.6125	1.7887
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709	1.6145	1.7892
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715	1.6164	1.7896

121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7721	1.6184	1.7901
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7727	1.6203	1.7905
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7733	1.6222	1.7910
124	1.6906	1.7231	1.6743	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7739	1.6240	1.7914
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7745	1.6258	1.7919
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7751	1.6276	1.7923
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7757	1.6294	1.7928
128	1.6957	1.7271	1.6798	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7763	1.6312	1.7932
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7769	1.6329	1.7937
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7774	1.6346	1.7941
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7780	1.6363	1.7945
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7786	1.6380	1.7950
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7791	1.6397	1.7954
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7797	1.6413	1.7958
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7802	1.6429	1.7962
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7808	1.6445	1.7967

Lampiran 9

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Titik persentase distribusi F untuk probabilitas = 0,05
--

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama Melisa Dwi Puspa merupakan anak ke dua dari lima bersaudara anak dari pasangan Bapak Nasim dan Ibu Upiah. Dilahirkan di Jakarta, 13 November 1992. Saat ini penulis bertempat tinggal di Bekasi Barat. Penulis memulai pendidikan mulai dari TK Dian Pertiwi Jakarta Timur, dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Pondok Kopi 08 Pagi pada tahun 2004, dan penulis meneruskan ke sekolah menengah pertama SMP 172 Jakarta Timur, dan meneruskan ke sekolah menengah atas di SMAN 107 Jakarta Timur dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis diterima di Jurusan Pendidikan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan bergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di Biro Entrepreneur pada tahun 2011. Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Bank BTN Cabang Bekasi dan Praktek Ketrampilan Mengajar di SMA N 30 Jakarta Pusat.